



# ANALISIS KELAYAKAN KEBIJAKAN PROGRAM SERAGAM GRATIS DAN PERALATAN SEKOLAH BAGI SISWA SD DAN SMP DI KOTA MAKASSAR

2025



Disusun Oleh :

Badan Riset Daerah Kota Makassar

Universitas Negeri Makassar | Universitas Hasanuddin

# LAPORAN AKHIR PENELITIAN



## **Analisis Kelayakan Kebijakan Program Seragam Gratis dan Peralatan Sekolah bagi Siswa SD dan SMP di Kota Makassar**

Tim Peneliti

Ir. Armin Darmawan, ST., MT., Ph.D, IPM / 198202202012121003/ Ketua Peneliti

Sulmiah, S.Pd., M.A.P. / 198402262019032012 / Anggota Peneliti

Dr. Dyan Paramitha Darmayanti, S. Pd., M. Pd. / 199505162022032016/ Anggota Peneliti

Dr. Novayanti Sophia Rukmana, S.Sos., M.Si / 199202042019032022/ Anggota Peneliti

Okky Nur Pratiwi Johansyah, S.IP, M.Si / 198910242022032006/ Anggota Peneliti

**SEPTEMBER 2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : Analisis Kelayakan Kebijakan Program Seragam Gratis dan Peralatan Sekolah bagi Siswa SD dan SMP di Kota Makassar

**Ketua Peneliti**

- a. Nama : Ir. Armin Darmawan, ST., MT., Ph.D, IPM
- b. NIP : 198202202012121003
- c. Nomor HP : 085399819763
- d. Alamat Email : [darmawanarmin@gmail.com](mailto:darmawanarmin@gmail.com) ; [armin.d@unhas.ac.id](mailto:armin.d@unhas.ac.id)
- e. Instansi : Universitas Hasanuddin

**Anggota Peneliti 1**

- a. Nama : Sulmiah, S.Pd., M.A.P.
- b. NIP : 198402262019032012
- c. Nomor HP : 082293953441
- d. Alamat Email : [sulmiah@unm.ac.id](mailto:sulmiah@unm.ac.id)
- e. Instansi : Universitas Negeri Makassar

**Anggota Peneliti 2**

- a. Nama : Dr. Dyan Paramitha Darmayanti, S. Pd., M. Pd
- b. NIP : 199505162022032016
- c. Nomor HP : 085241579616
- d. Alamat Email : [dyanparamitha@unm.ac.id](mailto:dyanparamitha@unm.ac.id)
- e. Instansi : Universitas Negeri Makassar

**Anggota Peneliti 3**

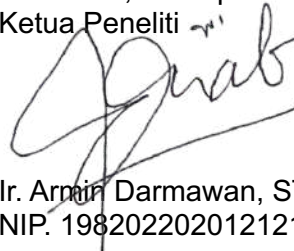
- a. Nama : Dr. Novayanti Sopia Rukmana, S.Sos., M.Si
- b. NIP : 199202042019032022
- c. Nomor HP : 085299971545
- d. Alamat Email : [novayanti@unm.ac.id](mailto:novayanti@unm.ac.id)
- e. Instansi : Universitas Negeri Makassar

**Anggota Peneliti 4**

- a. Nama : Oky Nur Pratiwi Johansyah, S.IP, M.Si
- b. NIP : 198910242022032006
- c. Nomor HP : 08114133373
- d. Alamat Email : [oky.nur.pratiwi@unm.ac.id](mailto:oky.nur.pratiwi@unm.ac.id)
- e. Instansi : Universitas Negeri Makassar

Makassar, 17 September 2025

Ketua Peneliti



Ir. Armin Darmawan, ST., MT., Ph.D, IPM  
NIP. 198202202012121003

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

### 1. Judul Penelitian:

Analisis Kelayakan Kebijakan Program Seragam dan Peralatan Sekolah Gratis bagi Siswa SD dan SMP di Kota Makassar

### 2. Tim Peneliti:

No	Nama / NIP	Jabatan	Bidang Ilmu	Instansi	Tugas dan Alokasi Waktu
1	Ir. Armin Darmawan, ST., MT., Ph.D, IPM	Ketua Peneliti	Teknik Industri	Universitas Hasanuddin	Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan penelitian, pengambilan dan pengolahan data, laporan keuangan, laporan kemajuan, dan laporan akhir, serta pencapaian luaran penelitian.
2	Sulmiah, S.Pd., M.A.P.	Anggota Peneliti 1	Pelayanan Publik	Universitas Negeri Makassar	Menyusun analisis terkait implementasi program seragam gratis, membuat instrumen penelitian, dan melaksanakan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan analisis hasil penelitian.
3	Dr. Dyan Paramitha Darmayanti, S.Pd., M.Pd	Anggota Peneliti 2	Sosial dan Pendidikan	Universitas Negeri Makassar	Menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan bahan penelitian, melakukan analisis data dan mendokumentasikan hasil penelitian.
4	Dr. Novayanti Sopia Rukmana, S.Sos., M.Si	Anggota Peneliti 3	Kebijakan Publik	Universitas Negeri Makassar	Melakukan penelitian, menganalisis data, dan bertanggung jawab atas FGD serta seminar hasil penelitian.

5	Oky Nur Pratiwi Johansyah, S.IP, M.Si	Anggota Peneliti 4	Administrasi Publik	Universitas Negeri Makassar	Membantu dalam pelaksanaan penelitian, pengurusan administrasi penelitian, melakukan analisis dampak sosial ekonomi, serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait program.
---	---------------------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	--

### 3. Objek Penelitian:

Penelitian ini adalah kajian terkait Kelayakan Kebijakan Program Seragam Gratis dan Peralatan Sekolah bagi siswa SD dan SMP di Kota Makassar, yang akan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi dan dampaknya terhadap partisipasi pendidikan di kota tersebut.

### 4. Masa Penelitian:

Penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.

### 5. Lokasi Penelitian:

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Makassar, dengan fokus pada sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama yang menerima kebijakan seragam gratis dan Peralatan Sekolah, serta melibatkan stakeholder terkait seperti Pemerintah Kota Makassar, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial.

### 6. Temuan yang Diharapkan:

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan yang mencakup:

- a. Analisis terkait kelayakan ekonomi dari Program Seragam Gratis dan Peralatan Sekolah bagi siswa SD dan SMP di Kota Makassar.
- b. Mengetahui dampak sosial dari kebijakan tersebut terhadap partisipasi pendidikan dan pengurangan angka putus sekolah.
- c. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi program ini di masa mendatang.
- d. Menilai aspek administratif, sosial, dan politik dalam pelaksanaan program seragam gratis.

### 7. Kontribusi Mendalam pada Bidang Keilmuan

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan kebijakan publik, pendidikan, sosial ekonomi, dan administrasi negara dengan menganalisis kelayakan implementasi kebijakan Program Seragam Gratis dan Peralatan Sekolah di Kota Makassar serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial di masyarakat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>IDENTITAS DAN URAIAN UMUM</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3. Obyektif .....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	5
2.2 Penelitian Terdahulu .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian .....	19
3.2 Populasi dan Sampel .....	19
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.4 Teknik Analisis Data.....	21
3.5 Tahapan Penelitian .....	22
3.5 Jadwal Penelitian .....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	25
4.2 Gambaran Umum Kebijakan Seragam Gratis .....	25

4.3. Implementasi Kebijakan Seragam Gratis .....	28
4.4 Persepsi dan Respon Masyarakat .....	32
4.5 Analisis Kelayakan Program.....	35
4.6 Identifikasi Masalah dan Potensi Perbaikan Program.....	45
4.6 Harapan dan Keberlanjutan Kebijakan Seragam Gratis .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Gambaran Umum Kebijakan Seragam Gratis.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59
<b>LAMPIRAN</b> .....	61
<b>DOKUMENTASI</b> .....	117

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Berdame, 2024) . Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan berbagai kebijakan, diantaranya Program Wajib Belajar 9 tahun dan pendidikan gratis.

Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan, masih terdapat kendala dalam pemerataan akses pendidikan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh keluarga kurang mampu adalah biaya pendidikan yang tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga biaya penunjang seperti seragam sekolah dan peralatan pembelajaran (Rohaeni & Saryono, 2018). Bagi keluarga dengan ekonomi terbatas di Kota Makassar, biaya seragam dan peralatan sekolah dapat menjadi beban finansial yang signifikan, bahkan menjadi faktor yang menyebabkan anak putus sekolah atau tidak bersekolah sama sekali.

Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur memiliki kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Makassar pada tahun 2023 mencapai sekitar 4,5% dari total penduduk. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (Herlina et al., 2024). Angka putus sekolah pada tingkat SD dan SMP masih menjadi permasalahan serius yang perlu ditangani oleh Pemerintah Kota Makassar.

Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah bagi siswa SD dan SMP di Kota Makassar diusulkan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga kurang mampu dan meningkatkan partisipasi pendidikan dasar. Program ini sejalan dengan visi Kota Makassar untuk menjadi "Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua" dan misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Kota Makassar. Analisis kelayakan kebijakan ini diperlukan untuk menilai sejauh mana program tersebut dapat dilaksanakan secara efektif

dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kota Makassar.

Program pemberian seragam dan peralatan sekolah gratis bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar diusulkan sebagai salah satu upaya strategis untuk mengurangi beban ekonomi keluarga kurang mampu sekaligus meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar. Kebijakan ini sejalan dengan visi Kota Makassar sebagai "Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua", serta mendukung misi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, analisis kelayakan terhadap program ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

Secara substansial, program ini bertujuan menghilangkan hambatan biaya non-akademik yang kerap dialami oleh peserta didik dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Seragam dan perlengkapan sekolah merupakan kebutuhan dasar yang jika tidak terpenuhi dapat berdampak pada rendahnya kehadiran, semangat belajar, bahkan menyebabkan putus sekolah. Oleh karena itu, intervensi ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan psikologis dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan setara. Program ini sekaligus menjadi instrumen penguatan keadilan sosial dalam sektor pendidikan dasar.

Kerangka desentralisasi pendidikan, Pemerintah Kota Makassar memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap karakteristik lokal. Pelaksanaan program ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan mandat konstitusional untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan merata. Namun demikian, efektivitas program sangat dipengaruhi oleh desain implementasi yang mencakup mekanisme penetapan sasaran, kualitas barang yang disalurkan, ketepatan waktu distribusi, serta sistem koordinasi antar perangkat daerah yang solid.

Aspek pembiayaan menjadi dimensi kunci dalam menentukan kelayakan program ini. Pemberian seragam dan peralatan sekolah secara gratis membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan dari APBD Kota Makassar. Oleh karena itu, analisis cost-benefit perlu dilakukan untuk menilai efisiensi program, dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang yang dihasilkan,

seperti peningkatan angka partisipasi murni, pengurangan angka putus sekolah, serta penguatan kualitas pendidikan dasar secara menyeluruh. Jika terbukti memiliki nilai manfaat yang tinggi terhadap biaya yang dikeluarkan, maka program ini dapat dikategorikan sebagai investasi sosial yang strategis.

Lebih jauh, program ini juga harus dinilai dari segi dampak sosialnya, khususnya dalam hal peningkatan motivasi belajar siswa, pengurangan stigmatisasi terhadap anak dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan hubungan kemitraan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pelaksanaan program yang dirancang secara komprehensif dan berbasis pada data yang valid akan meningkatkan akuntabilitas kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan, tetapi juga mendukung pencapaian visi besar Kota Makassar sebagai kota yang inklusif, humanis, dan layak huni bagi semua kalangan.

## **1.2. Pernyataan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam analisis kelayakan kebijakan Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah bagi siswa SD dan SMP di Kota Makassar adalah:

1. Bagaimana gambaran umum kebijakan seragam gratis di Kota Makassar?
2. Bagaimana mekanisme implementasi Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah yang dapat menjamin ketepatan sasaran program?
3. Apa saja potensi dampak Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah terhadap peningkatan partisipasi pendidikan dan pengurangan angka putus sekolah di Kota Makassar?
4. Bagaimana persepsi Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah dari aspek sosial, ekonomi, administratif dan politik ?

## **1.3. Obyektif**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis gambaran umum kebijakan seragam gratis di Kota Makassar.
2. Mengembangkan mekanisme implementasi Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah yang dapat menjamin ketepatan sasaran program.

3. Mengidentifikasi potensi dampak Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah terhadap peningkatan partisipasi pendidikan dan pengurangan angka putus sekolah di Kota Makassar.
4. Menganalisis kelayakan Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah dari aspek sosial, ekonomi, administratif dan politik

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoretis:**

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang analisis kebijakan publik dan kebijakan pendidikan.
- b. Memperkaya kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dasar pendidikan bagi warga negara.
- c. Mengembangkan model analisis kelayakan kebijakan yang dapat digunakan dalam evaluasi program-program pendidikan

##### **1.4.2. Manfaat Praktis:**

- a. Bagi Pemerintah Kota Makassar, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait implementasi Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah bagi siswa SD dan SMP.
- b. Bagi Dinas Pendidikan Kota Makassar, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan program-program peningkatan akses pendidikan.
- c. Bagi sekolah dan guru, hasil penelitian ini dapat membantu dalam memahami tantangan akses pendidikan yang dihadapi oleh siswa dari keluarga kurang mampu.
- d. Bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, penelitian ini dapat memberi harapan akan adanya solusi bagi permasalahan biaya pendidikan yang mereka hadapi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Dye (2013) dalam bukunya "Understanding Public Policy" didefinisikan sebagai "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling terkait yang diambil oleh aktor politik berkenaan dengan pemilihan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu di mana keputusan-keputusan tersebut seharusnya berada dalam kekuasaan aktor tersebut untuk dicapai (Patarai, 2020; Subianto, 2020; Wahab, 2021).

Kebijakan publik terdiri dari serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor untuk memecahkan masalah tertentu (Birkland, 2019; Knill & Tosun, 2020; Muadi et al., 2016; Suwitri, 2008). Dalam konteks Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah, kebijakan ini merupakan respons pemerintah terhadap permasalahan aksesibilitas pendidikan yang dihadapi masyarakat kurang mampu, juga (Lasswell & Lerner, 1951) dikenal sebagai pelopor studi kebijakan publik yang melihat kebijakan sebagai proses multidimensional. Ia mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*a projected program of goals, values and practices.*" Artinya, kebijakan publik adalah proyeksi program yang mencerminkan tujuan, nilai, dan praktik tertentu. Menurut Lasswell, kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keputusan teknokratis, tetapi juga sarat muatan nilai dan kepentingan politik. Dalam konteks ini, kebijakan Program Seragam Gratis mencerminkan nilai keadilan sosial dan inklusivitas pendidikan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah daerah.

(Anderson, 1975) Dalam edisi terbaru bukunya *Public Policymaking*, Anderson menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya keputusan formal, melainkan juga hasil interaksi antara berbagai aktor dan proses politik. Kebijakan publik adalah "*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" (Frankfurt, 1978; Frey, 1985; Hanf & O'Toole Jr, 1992). Penekanan pada "purposive course of action" menegaskan pentingnya arah dan tujuan dari kebijakan tersebut. Program Seragam Gratis

merupakan tindakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial berupa rendahnya akses pendidikan akibat hambatan ekonomi.

Pada aspek implementasi kebijakan dan menyatakan bahwa kebijakan publik adalah produk dari proses kompleks yang melibatkan formulasi, implementasi, dan evaluasi (Hill & Hupe, 2002, 2021). Mereka menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada perumusannya, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat lapangan. Dalam hal ini, pelaksanaan Program Seragam Gratis memerlukan desain kebijakan yang implementatif, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan masyarakat agar tujuan kebijakan benar-benar tercapai.

(Jones, 1984) Dalam *An Introduction to the Study of Public Policy*, Jones mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or set of problems.”* Definisi ini menyoroti bahwa baik tindakan maupun ketidakaktifan pemerintah merupakan bentuk kebijakan. Oleh karena itu, keputusan Pemerintah Kota Makassar untuk *melakukan* intervensi melalui penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah mencerminkan adanya pengakuan terhadap masalah akses pendidikan yang perlu ditangani secara aktif.

(Friedrich, 1940a, 1940b) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah *“a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose.”* Pandangan ini memperjelas bahwa kebijakan tidak dibuat dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks sosial dan politik tertentu. Dengan demikian, usulan Program Seragam Gratis harus mempertimbangkan kondisi lokal Kota Makassar, termasuk kemampuan fiskal daerah, struktur birokrasi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

### **2.1.2 Teori Analisis Kelayakan Kebijakan**

Penggunaan Teori Analisis Kelayakan Kebijakan dalam penelitian ini sangat tepat mengingat tujuan penelitian untuk mengevaluasi kelayakan Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah di Kota Makassar. Teori ini, menurut (Huffer et al., 2018) memberikan pendekatan yang komprehensif untuk menilai kebijakan dari berbagai aspek, seperti teknis, ekonomi, legal, operasional, dan politik. Aspek

teknis berfokus pada kemampuan distribusi seragam dan peralatan sekolah, aspek ekonomi melihat kelayakan anggaran, serta aspek legal dan operasional memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Selain itu, menurut (Weimer & Vining, 2017) analisis kelayakan kebijakan harus mencakup tiga aspek utama: efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Efektivitas akan mengukur sejauh mana program dapat mencapai tujuannya, seperti meningkatkan partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Efisiensi menilai perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh, sementara keadilan mengkaji distribusi manfaat dan biaya di antara kelompok masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dengan mengadopsi teori ini, penelitian ini akan memberikan analisis menyeluruh mengenai kelayakan program seragam gratis dan peralatan sekolah, baik dari sisi sosial, ekonomi, administratif, maupun politik. Teori ini juga memungkinkan penelitian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data yang valid dan relevan, serta mengidentifikasi potensi tantangan dalam implementasi program. Pendekatan ini sangat penting untuk mendukung pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Makassar.

### **2.1.3 Teori Keadilan Sosial dalam Pendidikan**

Dalam penelitian ini, Teori Keadilan Sosial yang dikembangkan oleh John Rawls dan Amartya Sen sangat relevan dan mendalam untuk diterapkan, khususnya dalam konteks akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu di Kota Makassar. Keadilan sosial dalam pendidikan merupakan isu penting yang mempengaruhi bagaimana kesempatan pendidikan dapat diakses secara adil oleh setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi mereka

Dalam bukunya (Rawls, 2001) mengajukan dua prinsip keadilan yang menjadi landasan teori keadilannya. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang sama, yang menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan dasar yang setara, termasuk dalam hal akses pendidikan. Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan, yang mengakui bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat diterima asalkan mereka memberi keuntungan yang lebih besar kepada

kelompok yang paling kurang beruntung (*the least advantaged members of society*). Dalam konteks pendidikan, prinsip ini menekankan bahwa meskipun ada ketidaksetaraan dalam masyarakat, kebijakan pendidikan harus dirancang untuk meminimalkan ketidaksetaraan tersebut dan memastikan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu juga mendapatkan akses yang setara dan kesempatan yang lebih besar untuk berhasil.

Dengan menggunakan teori Rawls, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah dapat dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini, dalam pandangan Rawls, dapat dianggap sebagai alat untuk mencapai keadilan distributif, di mana sumber daya pendidikan, dalam bentuk seragam dan perlengkapan sekolah, didistribusikan secara adil untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung agar mereka dapat berpartisipasi dalam pendidikan yang setara.

Selain Rawls, teori keadilan sosial yang dikembangkan oleh (Amartya & Amartya, 2009) sangat penting dalam memberikan dimensi tambahan pada analisis pendidikan. Sen mengemukakan bahwa keadilan sosial tidak hanya terkait dengan distribusi sumber daya, tetapi lebih penting lagi adalah kemampuan individu untuk mengonversi sumber daya tersebut menjadi fungsi-fungsi yang bernilai—yang dalam konteks pendidikan berarti memberikan setiap individu kapabilitas untuk mengakses dan memanfaatkan pendidikan. Pendekatan kapabilitas ini menekankan bahwa akses pendidikan harus disertai dengan kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Sen berargumen bahwa meskipun akses terhadap pendidikan mungkin sudah diberikan, tantangan utama yang dihadapi adalah kemampuan individu untuk memanfaatkan pendidikan tersebut. Bagi anak-anak dari keluarga miskin, kendala seperti keterbatasan biaya, kurangnya dukungan keluarga, atau kurangnya sumber daya pendidikan yang memadai sering kali menghalangi mereka untuk memanfaatkan pendidikan dengan maksimal. Dengan mengadopsi teori kapabilitas Sen, penelitian ini akan melihat bagaimana Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga mengurangi hambatan non-akademik yang menghalangi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses potensi mereka secara maksimal. Program ini diharapkan dapat memperluas kapabilitas mereka untuk tidak hanya

hadir di sekolah tetapi juga berkembang dalam lingkungan pendidikan yang lebih setara.

Teori keadilan sosial, baik yang dikemukakan oleh Rawls maupun Sen, digunakan dalam penelitian ini karena keduanya memberikan kerangka yang kuat untuk menganalisis keadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan, khususnya yang terkait dengan akses dan peluang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah di Kota Makassar, yang menjadi fokus penelitian ini, bertujuan untuk mengurangi hambatan biaya non-akademik yang sering kali menjadi penghalang utama bagi siswa dari keluarga miskin untuk bersekolah atau menyelesaikan pendidikan mereka.

Melalui Prinsip Keadilan Rawls, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan tersebut membantu menciptakan kesetaraan kesempatan bagi siswa yang kurang mampu, memastikan bahwa mereka tidak tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan kapabilitas Sen, penelitian ini juga akan mengeksplorasi potensi dampak sosial dari program ini, terutama dalam meningkatkan kapabilitas siswa untuk memanfaatkan pendidikan mereka secara maksimal, bukan hanya sebagai akses, tetapi juga sebagai kesempatan untuk berkembang.

Lebih jauh lagi, Teori Keadilan Sosial memberikan perspektif yang diperlukan untuk menilai keberhasilan kebijakan dari berbagai dimensi, baik itu dari sisi efektivitas (sejauh mana program dapat mencapai tujuan peningkatan partisipasi pendidikan dan pengurangan angka putus sekolah), efisiensi (sebandingkan biaya dengan manfaat yang diperoleh), dan keadilan (distribusi manfaat yang adil bagi siswa dari keluarga miskin). Oleh karena itu, penggunaan teori ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi kelayakan kebijakan dengan lebih holistik, memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang adil dan berkelanjutan bagi kelompok yang paling membutuhkan.

Dengan demikian, Teori Keadilan Sosial tidak hanya relevan, tetapi juga penting untuk mengarahkan penelitian ini dalam menilai kelayakan dan dampak sosial dari Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan inklusif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Makassar.

#### **2.1.4 Teori Implementasi Kebijakan**

Penggunaan Teori Implementasi Kebijakan dalam penelitian ini sangat relevan karena memberikan kerangka yang komprehensif untuk mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah di Kota Makassar. (Van Meter & Van Horn, 1975) mengidentifikasi enam variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Pertama, standar dan tujuan kebijakan menjadi aspek utama yang harus jelas dan terukur agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Dalam konteks Program Seragam Gratis, tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Penetapan tujuan yang tepat akan memastikan bahwa kebijakan ini memiliki arah yang jelas dalam pencapaiannya.

Kedua, sumber daya merupakan faktor yang sangat krusial. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, maupun peralatan yang diperlukan untuk menjalankan program. Program seragam gratis membutuhkan alokasi anggaran yang cukup serta dukungan sumber daya yang efisien untuk mendistribusikan seragam dan peralatan sekolah kepada siswa yang membutuhkan.

Ketiga, komunikasi antar organisasi adalah variabel penting dalam implementasi kebijakan. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat akan memastikan bahwa program ini berjalan dengan lancar. Dalam program seragam gratis, komunikasi yang efektif dapat memperlancar distribusi dan membantu menyelesaikan kendala-kendala yang mungkin timbul di lapangan.

Keempat, karakteristik agen pelaksana juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Agen pelaksana, dalam hal ini pemerintah daerah dan sekolah, harus memiliki keterampilan, pemahaman, dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan kebijakan dengan efektif. Tanpa agen pelaksana yang kompeten dan berkomitmen, kebijakan ini berpotensi gagal dalam implementasinya.

Kelima, kondisi ekonomi, sosial, dan politik di tingkat lokal turut mempengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan. Kondisi ekonomi yang baik, dukungan sosial yang kuat, dan stabilitas politik akan meningkatkan peluang keberhasilan program. Dalam hal ini, faktor-faktor tersebut akan memastikan

bahwa kebijakan mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Keenam, disposisi implementor atau sikap pelaksana juga sangat mempengaruhi kelancaran implementasi kebijakan. Sikap positif dan pemahaman tentang tujuan kebijakan akan mendorong agen pelaksana untuk bekerja lebih baik. Sebaliknya, jika agen pelaksana tidak memiliki komitmen atau memahami pentingnya program, maka program tersebut berpotensi mengalami kegagalan.

Di sisi lain, George Edwards III (2012) dalam "Implementing Public Policy" mengemukakan empat faktor kritis yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Pertama, komunikasi yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai. Dalam Program Seragam Gratis, hal ini mencakup komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat agar distribusi berjalan efektif.

Kedua, sumber daya kembali menjadi elemen penting dalam kelancaran implementasi kebijakan. Ketersediaan dana yang cukup, serta distribusi yang efisien, akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program seragam gratis. Tanpa sumber daya yang memadai, program ini tidak akan berhasil mencapai tujuannya.

Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana berhubungan erat dengan keberhasilan implementasi kebijakan. Jika agen pelaksana memiliki sikap yang positif dan pemahaman yang baik tentang pentingnya program seragam gratis, mereka akan lebih termotivasi untuk menjalankan program ini dengan maksimal.

Keempat, struktur birokrasi yang jelas dan efisien akan mempermudah jalannya implementasi kebijakan. Birokrasi yang terstruktur dengan baik memastikan bahwa setiap pihak tahu tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak ada kebingungan atau penundaan dalam pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, penggunaan Teori Implementasi Kebijakan dalam penelitian ini memberikan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh dalam mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah di Kota Makassar. Dengan memanfaatkan teori ini, penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi hambatan yang mungkin muncul, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi program di masa depan. Teori ini juga memungkinkan penelitian

untuk mengevaluasi secara mendalam mengenai ketersediaan sumber daya, komunikasi antar organisasi, serta kompetensi dan disposisi pelaksana, yang semuanya sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sukses.

### **2.1.5 Teori Ekonomi Pendidikan**

Teori Ekonomi Pendidikan merupakan pendekatan yang sangat relevan dan penting dalam penelitian ini, terutama untuk mengevaluasi Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah yang bertujuan mengurangi hambatan finansial bagi siswa dari keluarga kurang mampu di Kota Makassar. Teori ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana investasi dalam pendidikan dapat berdampak pada pengembangan individu dan pertumbuhan sosial-ekonomi. Dua pendekatan utama dalam teori ekonomi pendidikan, yaitu kembali pada investasi pendidikan (Psacharopoulos dan Patrinos, 2018) dan Teori Human Capital (Becker, 1964; Schultz, 1961) sangat mendalam untuk diterapkan dalam konteks penelitian ini.

Dalam "Returns to Investment in Education: A Decennial Review" (2018), Psacharopoulos dan Patrinos menyoroti bahwa investasi dalam pendidikan dasar memiliki tingkat pengembalian sosial dan pribadi yang tinggi, terutama di negara-negara berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk pendidikan, termasuk subsidi pendidikan seperti penyediaan seragam dan peralatan sekolah, dapat mengurangi hambatan finansial yang sering kali menghalangi siswa dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah. Dalam konteks ini, program seragam gratis tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap tingkat partisipasi pendidikan.

Menggunakan teori ini, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin di Kota Makassar. Program ini dapat dianggap sebagai bentuk investasi pendidikan yang tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu (yaitu, siswa yang mendapatkan seragam dan perlengkapan sekolah), tetapi juga memberikan pengembalian sosial yang lebih besar dalam jangka panjang, seperti peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah. Dengan demikian, teori kembali pada investasi pendidikan sangat relevan untuk menilai dampak jangka panjang

dari kebijakan ini terhadap pengembangan kapabilitas individu dan pertumbuhan sosial-ekonomi di kota tersebut.

Teori Human Capital yang dikembangkan oleh Schultz (1961) dan Becker (1964, 2009) menekankan pentingnya investasi pada manusia melalui pendidikan untuk meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pendidikan, Human Capital menganggap pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berkontribusi pada ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah dapat dipandang sebagai investasi dalam sumber daya manusia, karena memberikan anak-anak dari keluarga miskin kesempatan yang lebih besar untuk mengakses pendidikan yang layak.

Dengan menyediakan seragam dan peralatan sekolah gratis, program ini dapat menghilangkan hambatan non-akademik yang sering kali menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan. Sebagai contoh, tanpa akses yang memadai terhadap seragam dan perlengkapan sekolah, anak-anak sering kali tidak dapat bersekolah atau merasa terisolasi karena stigma sosial. Dengan menghilangkan hambatan ini, program seragam gratis memungkinkan siswa untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran, meningkatkan kapabilitas mereka untuk berkembang secara akademis dan sosial.

Teori Human Capital berperan penting dalam menjelaskan bagaimana pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga berdampak pada kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Investasi pada seragam gratis dianggap sebagai bagian dari upaya untuk memaksimalkan potensi manusia, yang dapat menghasilkan pengembalian sosial dalam bentuk peningkatan produktivitas di masa depan. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, program ini berkontribusi pada pembentukan sumber daya manusia yang lebih terampil dan terdidik, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.

Teori Ekonomi Pendidikan digunakan dalam penelitian ini karena menyediakan kerangka yang kuat untuk menilai dampak ekonomi dari kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pengurangan hambatan finansial dalam mengakses pendidikan. Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah

yang menjadi fokus penelitian ini dapat dipandang sebagai investasi langsung dalam pendidikan, yang tidak hanya mengurangi hambatan ekonomi bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga berpotensi meningkatkan partisipasi pendidikan dan pertumbuhan sosial-ekonomi dalam jangka panjang.

Dengan menggunakan teori Psacharopoulos dan Patrinos (2018), penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana investasi dalam pendidikan dasar, termasuk melalui penyediaan seragam gratis, memberikan pengembalian sosial dan pribadi yang tinggi. Sementara itu, dengan pendekatan Human Capital, penelitian ini dapat menggali lebih dalam bagaimana pendidikan yang lebih merata dapat meningkatkan kapabilitas individu dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, teori Ekonomi Pendidikan memberikan pendekatan yang komprehensif untuk menilai dampak Program Seragam Gratis terhadap akses pendidikan dan kesejahteraan ekonomi jangka panjang di Kota Makassar.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan analisis kelayakan kebijakan Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irawati, E., & Susetyo, W tahun 2017 berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Blitar. Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Kota Blitar. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana kebijakan pendidikan nasional, khususnya yang berkaitan dengan akses dan kualitas pendidikan dasar, diterapkan di tingkat daerah. Penelitian ini relevan dengan Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah karena membahas tentang pengelolaan kebijakan pendidikan yang dapat dijadikan acuan dalam memahami bagaimana program seragam gratis dan peralatan sekolah dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks ini, hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan, termasuk alokasi anggaran, pemantauan distribusi, dan pelaksanaan di lapangan.

2. Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Blitar. Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Kota Blitar. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana kebijakan pendidikan nasional, khususnya yang berkaitan dengan akses dan kualitas pendidikan dasar, diterapkan di tingkat daerah. Penelitian ini relevan dengan Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah karena membahas tentang pengelolaan kebijakan pendidikan yang dapat dijadikan acuan dalam memahami bagaimana program seragam gratis dan peralatan sekolah dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks ini, hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan, termasuk alokasi anggaran, pemantauan distribusi, dan pelaksanaan di lapangan.
3. Indrawati, P. A., & Adi, A. S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Studi tentang Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Juwet, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri). Penelitian ini menganalisis partisipasi masyarakat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan fokus pada fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi keluarga penerima manfaat di Kabupaten Kediri. Penelitian ini relevan untuk Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah karena membahas peran serta masyarakat dalam keberhasilan implementasi kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam mendukung keberhasilan program, seperti program seragam sekolah gratis, yang membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat.
4. Fauzia, O. T. (2024). Kewirausahaan Politik Kepala Daerah: Studi Kasus Program Unggulan Panca “Pinter Rakyat” di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini mengkaji kewirausahaan politik kepala daerah dalam mengimplementasikan program unggulan, seperti Program Panca “Pinter Rakyat” di Kabupaten Wonogiri. Program ini berfokus pada

pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang salah satunya dapat mencakup pendidikan. Meskipun fokus utamanya pada kewirausahaan politik, penelitian ini relevan dengan kebijakan pendidikan dan distribusi sumber daya sosial, seperti seragam dan peralatan sekolah, karena mengungkapkan bagaimana kepala daerah dapat mengelola dan mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif mengenai peran pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan sosial yang berdampak pada masyarakat secara langsung.

5. Syamsuddin, S., Hermansyah, H., & Sani, K. R. (2022). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Program Seragam Sekolah Gratis di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini secara khusus mengkaji strategi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Program Seragam Sekolah Gratis di Kabupaten Sinjai. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pemerintah daerah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini berhasil mengurangi beban ekonomi keluarga, tantangan utama dalam implementasi adalah dalam hal distribusi yang tidak merata, masalah administrasi, dan keterbatasan anggaran.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji beberapa aspek dari kebijakan seragam sekolah gratis, tidak banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis kelayakan program seragam gratis dari aspek sosial, ekonomi, administratif, dan politik secara komprehensif. Penelitian ini akan mengisi gap tersebut, fokus pada kondisi eksisting terkait akses pendidikan dasar bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu di Kota Makassar serta mekanisme implementasi Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah yang dapat menjamin ketepatan sasaran. Penelitian ini juga akan menganalisis potensi dampak program terhadap peningkatan partisipasi pendidikan dan pengurangan angka putus sekolah di Kota Makassar. Kebaruan penelitian ini terletak pada perluasan pemahaman tentang efektivitas Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah dalam meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Studi-studi terdahulu menyoroti berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam perancangan dan implementasi program, seperti ketepatan

sasaran, mekanisme distribusi, koordinasi antar lembaga, dan keberlanjutan program.

Penelitian-penelitian tersebut mendukung bahwa Program bantuan seragam/peralatan sekolah efektif meningkatkan partisipasi pendidikan dan mengurangi putus sekolah. Keberhasilan program tergantung pada implementasi yang tepat, koordinasi antar lembaga, dan keberlanjutan anggaran. Evaluasi dampak jangka panjang dan efisiensi biaya penting sebagai dasar pengambilan keputusan. Program tersebut relevan bagi pemerintah daerah yang ingin menerapkan kebijakan serupa, dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan kapasitas institusi.

Program pemberian seragam dan peralatan sekolah gratis dimaksudkan tidak hanya untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, tetapi juga sebagai bentuk intervensi sosial yang mendorong pemerataan akses pendidikan. Di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam, anak-anak dari keluarga kurang mampu sering menghadapi hambatan non-akademik seperti keterbatasan biaya untuk membeli perlengkapan sekolah. Menghilangkan hambatan tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendorong peningkatan partisipasi pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar.

Dari sisi kebijakan publik, inisiatif ini mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok rentan dan merupakan wujud konkret dari amanat konstitusi untuk menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan yang layak. Dalam konteks desentralisasi pendidikan di Indonesia, Pemerintah Kota Makassar memiliki otonomi dan tanggung jawab untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pelaksanaan program ini menjadi indikator sejauh mana kebijakan daerah mampu mengartikulasikan visi pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sejumlah faktor, antara lain kejelasan mekanisme targeting penerima manfaat, kualitas barang yang disalurkan, serta ketepatan waktu distribusi. Pengalaman dari daerah lain menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi program serupa adalah lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dan kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis. Pemerintah Kota Makassar perlu

memastikan perencanaan dan pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara terintegrasi dan transparan.

Lebih lanjut, aspek pembiayaan juga menjadi komponen penting dalam analisis kelayakan. Program ini akan membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar dan berkelanjutan dari APBD Kota Makassar. Oleh karena itu, analisis cost-benefit perlu dilakukan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Program ini akan layak diprioritaskan sebagai investasi sosial jangka panjang dalam sektor pendidikan jika mampu menunjukkan rasio manfaat terhadap biaya yang tinggi—misalnya melalui peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Evaluasi program ini juga harus mencakup dimensi sosial, seperti dampaknya terhadap semangat belajar siswa, penguatan hubungan antara sekolah dan orang tua, serta pengurangan stigma terhadap siswa dari keluarga miskin. Pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berbasis data menjadikan program seragam dan peralatan sekolah gratis di Kota Makassar berpotensi menjadi model praktik baik dalam pembangunan pendidikan lokal. Ini akan berkontribusi secara langsung pada pencapaian visi Kota Makassar sebagai kota dunia yang nyaman dan ramah bagi semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah bagi siswa SD dan SMP di Kota Makassar. Pendekatan kualitatif akan memberikan pemahaman mendalam tentang perspektif para pemangku kepentingan terkait dengan implementasi program ini, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan.

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian deskriptif-analitis, yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi eksisting serta menganalisis keterkaitan antar variabel yang diteliti. Secara spesifik, penelitian ini menerapkan metode studi kasus yang berfokus pada analisis kelayakan kebijakan Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah di Kota Makassar. Pendekatan ini akan menggali secara mendalam aspek-aspek kebijakan yang relevan dan implementasi di lapangan.

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali data secara mendalam, memberikan pemahaman yang lebih lengkap, serta memberikan dasar yang lebih kuat dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan.

#### **3.2. Populasi dan Sampel (Sumber Data) / Informan**

##### **3.2.1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh stakeholder yang terkait dengan implementasi Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah di Kota Makassar, yang meliputi:

1. Pemerintah Kota Makassar
2. Dinas Pendidikan Kota Makassar
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
4. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar
5. Siswa SD dan SMP yang mendapat seragam gratis di Kota Makassar
6. Orang tua siswa yang mendapat seragam gratis di Kota Makassar
7. Produsen seragam

### **3.2.2. Teknik Sampling**

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk pengambilan data kualitatif, di mana informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dan dapat memberikan wawasan mendalam terkait tujuan penelitian.

### **3.2.3. Informan**

Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Pejabat Pemerintah Kota Makassar:**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar
3. Staf Dinas Pendidikan yang menangani program bantuan pendidikan

#### **2. Pihak Sekolah:**

1. Kepala Sekolah SD
2. Kepala Sekolah SMP
3. Guru

#### **3. Masyarakat:**

1. Orang tua siswa
2. Orang tua siswa
3. Tokoh masyarakat

#### **4. Sektor Swasta:**

1. Produsen/penyedia seragam sekolah

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memastikan komprehensivitas dan kedalaman analisis

#### **3.3.1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)**

Wawancara mendalam dilakukan dengan para informan kunci yang telah ditentukan. Wawancara akan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan data sekaligus memberikan fleksibilitas untuk menggali informasi yang lebih dalam. Wawancara akan direkam

(dengan izin informan) dan ditranskripsikan untuk analisis lebih lanjut. Topik wawancara meliputi:

1. Perspektif terhadap Program Seragam Gratis dan peralatan sekolah
2. Tantangan dalam akses pendidikan dasar di Kota Makassar
3. Mekanisme implementasi yang efektif
4. Potensi dampak program

Mengingat masalah dalam penelitian ini merupakan isu sensitif yang banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, baik secara langsung maupun di media sosial, maka identitas semua informan peneliti dirahasiakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga privasi dan keamanan informan sesuai dengan kode etik penelitian yang mengutamakan kerahasiaan dan perlindungan data pribadi.

### **3.3.2. Studi Dokumen**

Studi dokumen akan dilakukan terhadap:

1. Dokumen kebijakan pendidikan di Kota Makassar
2. Laporan penelitian terdahulu tentang program serupa
3. Dokumen anggaran daerah dan alokasi untuk sektor pendidikan
4. Regulasi terkait bantuan pendidikan

### **3.3.3. Observasi**

Observasi dilakukan di beberapa sekolah dasar dan menengah pertama di Kota Makassar untuk melihat secara langsung kondisi siswa terkait ketersediaan seragam dan peralatan sekolah. Observasi juga dilakukan terhadap proses distribusi bantuan pendidikan yang sudah ada untuk memahami mekanisme implementasi program bantuan yang efektif.

## **3.4. Teknik Analisis Data**

### **3.4.1. Analisis Data Kualitatif**

Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, dan studi dokumen dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) yang dikembangkan oleh Braun & Clarke (2006). Langkah-langkah analisis tematik meliputi:

1. Familiarisasi dengan data: membaca transkrip berulang kali untuk memahami data secara keseluruhan

2. Pengkodean awal: mengidentifikasi unit-unit makna dalam data
  3. Pencarian tema: mengelompokkan kode-kode yang memiliki pola serupa
  4. Peninjauan tema: memastikan tema yang diidentifikasi sesuai dengan data
  5. Pendefinisian tema: memberikan nama dan batasan yang jelas untuk setiap tema
  6. Penulisan laporan: mengintegrasikan analisis tematik dalam narasi laporan
- Untuk membantu proses analisis data kualitatif, akan digunakan software NVivo yang memungkinkan pengkodean, kategorisasi, dan visualisasi data kualitatif secara sistematis.

### **3.4.2. Triangulasi Data**

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian, akan dilakukan triangulasi dengan cara:

1. Triangulasi Sumber: membandingkan data dari berbagai sumber (pemerintah, sekolah, masyarakat, ahli)
2. Triangulasi Metode: membandingkan data yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data (wawancara, studi dokumen, observasi)

Hasil triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan konfirmabilitas temuan penelitian.

### **3.5. Tahapan Penelitian**

Penelitian ini dimulai dengan tahap perencanaan yang mencakup penetapan tujuan penelitian dan desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pada tahap ini, populasi dan sampel ditentukan, serta teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan kunci yang memiliki pengetahuan relevan terkait dengan program seragam gratis dan peralatan sekolah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para stakeholder yang telah dipilih, serta studi dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik, yang bertujuan untuk menggali tema-tema utama dari wawancara dan studi dokumen yang ada. Temuan-temuan dari analisis tematik ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel yang berkaitan dengan implementasi dan dampak program seragam gratis.

Selanjutnya, analisis kelayakan dilakukan dengan pendekatan analisis biaya-manfaat (Cost-Benefit Analysis) untuk menilai kelayakan ekonomi program, serta analisis terhadap aspek administratif, sosial, dan politik untuk menilai keberlanjutan program seragam gratis.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini mengadopsi triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pemerintah, sekolah, dan masyarakat, serta menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda (wawancara dan studi dokumen). Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dan memastikan bahwa temuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan (untuk lebih jelas, silakan lihat **gambar 3.1**).



**Gambar 3.1 Plan Penelitian**

### 3.6. Jadwal Penelitian



Gambar 3.1 Jadwal Penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi pada koordinat 119°18'27,97" BT dan 5°8'6,19" LS, dengan luas wilayah sekitar 175,77 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 14 kecamatan. Secara administratif, kota ini berbatasan dengan Kabupaten Gowa di sebelah selatan, Kabupaten Maros di sebelah timur, Kabupaten Takalar di sebelah utara, dan Selat Makassar di sebelah barat. Makassar memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata antara 20°C hingga 32°C dan ketinggian 0–25 meter di atas permukaan laut. Sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki pelabuhan internasional dan bandara internasional yang menjadikannya sebagai hub ekonomi dan transportasi utama. Kota ini juga merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata, yang diarahkan sebagai Pekan Kegiatan Nasional (PKN) berskala global dan mendorong pertumbuhan kota-kota di sekitarnya.

Dalam konteks sosial budaya, Makassar dikenal dengan keberagaman etnis dan budaya, yang tercermin dalam berbagai festival, kuliner, dan tradisi lokal. Bahasa yang digunakan mayoritas adalah bahasa Makassar, yang merupakan bahasa asli suku Makassar, namun bahasa Indonesia juga digunakan secara luas dalam komunikasi sehari-hari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, jumlah sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: 473 unit SD, 225 unit SMP, dan 134 unit SMA.

#### **4.2 Gambaran Umum Kebijakan Seragam Gratis**

Program seragam gratis bagi siswa SD dan SMP di Kota Makassar merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang lahir dari visi dan misi Walikota terpilih. Sejak masa kampanye, penyediaan seragam sekolah secara gratis ditempatkan sebagai salah satu janji politik utama yang ditujukan untuk meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya pada saat penerimaan peserta didik baru. Kondisi ini berangkat dari realitas sosial di Kota Makassar, di mana banyak orang tua merasa terbebani dengan tingginya biaya kebutuhan sekolah,

terutama ketika harus menanggung pengeluaran seragam untuk lebih dari satu anak yang masuk sekolah secara bersamaan.

Secara politis, program ini diposisikan sebagai prioritas pembangunan daerah, sejalan dengan upaya pemerintah kota meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar. Dalam dokumen kebijakan, seragam gratis dipandang bukan sekadar bantuan perlengkapan sekolah, melainkan juga bentuk intervensi sosial ekonomi pemerintah daerah untuk menekan praktik komersialisasi seragam yang selama ini marak di sekolah-sekolah. Dengan adanya program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa sekolah negeri tidak lagi menjadi arena bisnis seragam, melainkan benar-benar fokus pada pelayanan pendidikan.

Pada awalnya, program seragam gratis tidak diakomodasi dalam APBD pokok karena siklus penganggaran yang telah disahkan sebelumnya. Namun, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan penghematan pada sejumlah pos belanja, Pemerintah Kota Makassar berhasil mengalokasikan kembali dana dari berbagai pos kegiatan. Beberapa pos yang mengalami pemangkasan, seperti biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, berhasil mengumpulkan anggaran sekitar Rp11–12 miliar. Anggaran tersebut kemudian dialokasikan khusus untuk pengadaan seragam bagi siswa SD dan SMP negeri di Tahun 2025 dan untuk tahun selanjutnya putihkan dialokasikan dari APBD Kota Makassar. Berikut adalah ringkasan data kuantitatif terkait pelaksanaan program seragam gratis pada tahun pertama:

**Tabel 1: Ringkasan Data Program Seragam Gratis Kota Makassar**

No	Kategori	Keterangan
1	Jumlah SD Negeri	314 Sekolah
2	Jumlah SMP Negeri	55 Sekolah
3	Jumlah Siswa Baru (SD)	19.000 Siswa
4	Jumlah Siswa baru SMP	14.000 Siswa
5	Total Siswa sasaran	33.000 Siswa
6	Jumlah Seragam yang dibagikan	66.000 Pasang Seragam (2 pasang per siswa)

**Sumber: diolah dari hasil penelitian.**

Tabel di atas memperlihatkan skala dan cakupan Program Seragam Gratis yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar pada tahun pertama pelaksanaannya. Dari sisi lembaga pendidikan, program ini mencakup 314 SD negeri dan 55 SMP negeri yang tersebar di seluruh wilayah kota. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya menyoar sekolah-sekolah tertentu, tetapi menyeluruh pada seluruh satuan pendidikan dasar negeri. Dari sisi penerima manfaat, jumlah siswa baru SD diproyeksikan sekitar 19 ribu orang, sementara siswa baru SMP sekitar 14 ribu orang. Total keseluruhan mencapai kurang lebih 33 ribu siswa. Setiap siswa memperoleh dua pasang seragam sehingga total seragam yang harus disiapkan pemerintah mencapai 66 ribu pasang. Jumlah ini menandakan adanya komitmen serius dalam menjamin pemerataan akses pendidikan sekaligus meringankan beban keluarga pada awal tahun ajaran baru.

Secara keseluruhan, data kuantitatif ini memperjelas bahwa Program Seragam Gratis tidak hanya memiliki dasar politik dan regulatif, tetapi juga basis anggaran dan implementasi yang nyata, sehingga dapat dipandang sebagai kebijakan publik yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.

Secara regulatif, program ini diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) dan berbagai surat edaran dari Dinas Pendidikan. Aturan tersebut tidak hanya mengatur tentang mekanisme pemberian seragam, tetapi juga menetapkan standarisasi pemakaian seragam bagi siswa baru. Siswa SD dan SMP negeri, misalnya, diwajibkan mengenakan seragam putih-merah dan putih-biru dari Senin hingga Kamis, sementara seragam batik atau olahraga tidak lagi diwajibkan bagi siswa baru. Dengan kebijakan ini, pemerintah menutup peluang sekolah untuk menjual seragam tambahan yang selama ini kerap menjadi beban bagi orang tua. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga secara tegas melarang seluruh satuan pendidikan tingkat TK, SD, dan SMP untuk menjual seragam maupun atribut sekolah kepada siswa. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 800/3493/Disdik/V/2025 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai tindak lanjut dari Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025. Kebijakan tersebut mulai berlaku efektif pada tahun ajaran 2025/2026 dan menjadi bagian penting dari reformasi tata kelola pendidikan di tingkat daerah, dengan tujuan menghapus potensi pungutan liar serta memastikan keadilan dan transparansi dalam pengadaan seragam sekolah.

Dengan demikian, program seragam gratis di Kota Makassar memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, lahir sebagai janji politik yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik. Kedua, merupakan prioritas anggaran daerah yang dibiayai melalui mekanisme efisiensi. Ketiga, memiliki dimensi regulatif yang berfungsi menertibkan praktik komersialisasi seragam di sekolah melalui kebijakan larangan penjualan seragam dan atribut pendidikan. Keempat, program ini diposisikan sebagai strategi pemerataan akses pendidikan dengan memberikan bantuan langsung kepada seluruh siswa baru SD dan SMP negeri tanpa membedakan latar belakang ekonomi.

### **4.3 Implementasi Kebijakan Seragam Gratis**

#### **4.3.1. Perencanaan & Anggaran**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program seragam gratis di Kota Makassar dipengaruhi oleh faktor politik dan teknis fiskal daerah. Secara politis, kebijakan ini merupakan janji kampanye Walikota yang dimasukkan ke dalam visi-misi pemerintahan. Namun, secara administratif, program tersebut menghadapi hambatan karena APBD Pokok 2025 telah disahkan lebih dahulu pada Desember 2024, sebelum Walikota dilantik pada Februari 2025. Akibatnya, program tidak dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran reguler dan baru terealisasi melalui mekanisme efisiensi anggaran.

Kondisi ini bila dibandingkan dengan teori perencanaan kebijakan menurut Anderson (2011), memperlihatkan adanya perbedaan. Anderson menekankan bahwa kebijakan ideal sebaiknya dirancang melalui siklus yang sistematis: identifikasi masalah, perumusan kebijakan, adopsi, implementasi, dan evaluasi. Pada kasus seragam gratis, perumusan dan penganggaran tidak melalui alur penuh karena tekanan politik untuk segera merealisasikan janji kampanye. Akibatnya, perencanaan bersifat reaktif, bergantung pada ruang fiskal dari efisiensi anggaran, bukan hasil perencanaan jangka panjang. Dari sisi pembiayaan, pemerintah berhasil menghimpun sekitar Rp11–12 miliar dari pemangkasan berbagai pos, seperti biaya rapat dan perjalanan dinas. Dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 33 ribu siswa baru SD dan SMP negeri, dengan target 66 ribu pasang seragam (dua pasang per siswa). Secara angka, alokasi ini menunjukkan adanya prioritas yang jelas terhadap sektor pendidikan. Namun, bila dianalisis dengan teori efisiensi dan efektivitas anggaran

(Haldenwang, 2017), model pembiayaan ini masih rentan. Karena bersumber dari efisiensi, keberlanjutannya sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah melakukan penghematan di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi bila tidak segera diintegrasikan ke dalam APBD rutin.

Lebih lanjut, teori kebijakan redistributif (Lowi, 1972) dapat digunakan untuk membaca karakter program ini. Seragam gratis termasuk kategori kebijakan redistributif, yakni kebijakan yang secara langsung memindahkan sumber daya dari negara kepada masyarakat untuk menciptakan pemerataan sosial. Dari temuan lapangan, pemerintah daerah memilih sasaran siswa baru, bukan seluruh siswa, dengan alasan efektivitas anggaran dan beban ekonomi orang tua yang lebih tinggi pada saat awal masuk sekolah. Hal ini sejalan dengan prinsip *targeting the most critical needs* dalam teori redistribusi.

Dengan demikian, dari sisi perencanaan dan anggaran, implementasi program seragam gratis di Kota Makassar memperlihatkan kombinasi antara komitmen politik dan adaptasi fiskal. Secara empiris, pemerintah berhasil merealisasikan program meski tidak terencana dalam APBD pokok. Namun, secara teoretis, hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan ideal yang berbasis siklus perencanaan dengan kebijakan aktual yang berbasis kebutuhan politik dan fiskal jangka pendek.

#### **4.3.2. Mekanisme Pengadaan & Distribusi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan seragam gratis di Kota Makassar dilakukan melalui sistem kontrak payung (*framework contract*) yang diintegrasikan dengan e-katalog. Proses ini melibatkan Pokja pengadaan barang dan jasa serta diarahkan untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) lokal. Dari sekitar 60 UMKK yang diajukan, hanya 29 penyedia yang lolos konsolidasi dan memenuhi standar legalitas maupun kualitas kain. Strategi ini tidak hanya bertujuan menyediakan seragam, tetapi juga memiliki dimensi pemberdayaan ekonomi lokal, sejalan dengan arahan Walikota agar koperasi dan UMKK memperoleh manfaat dari program prioritas.

Distribusi seragam dilakukan melalui sekolah masing-masing, berbasis pada data ukuran siswa baru yang dikumpulkan saat pendaftaran ulang. Sistem *by size* ini dirancang untuk mengurangi risiko seragam tidak sesuai, dengan mekanisme penukaran langsung jika terdapat kesalahan ukuran. Selain itu,

penyedia ditugaskan per sekolah sehingga dapat melakukan penyesuaian di lapangan secara cepat. Namun, meskipun mekanisme distribusi ini relatif efektif, dalam praktiknya masih terjadi keterlambatan. Hingga pertengahan September, banyak sekolah yang belum menerima seragam, padahal distribusi seragam awalnya dijanjikan selesai pada akhir Agustus, sementara tahun ajaran sudah dimulai sejak pertengahan Juli. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan kapasitas UMKK yang harus menyesuaikan proses jahit dengan jumlah pesanan massal dalam waktu singkat. Akibatnya, kebijakan ini belum dianggap tepat sasaran, karena orang tua akhirnya harus membeli seragam secara mandiri, padahal kebijakan ini semestinya dibuat untuk meringankan beban orang tua dalam membeli seragam sekolah.

Jika dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), mekanisme pengadaan ini mencerminkan adanya keterkaitan erat antara sumber daya, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial-ekonomi. Dalam kondisi ideal, pengadaan barang publik seharusnya mempertimbangkan kapasitas penyedia agar target waktu tercapai. Namun dalam kasus ini, meskipun tujuan redistributif tercapai (pemberdayaan UMKK), keterlambatan distribusi mengindikasikan adanya ketegangan antara efisiensi (kecepatan distribusi) dan pemberdayaan (partisipasi UMKK).

Selain itu, bila dilihat dari perspektif governance dan kolaborasi multi-aktor (Rhodes, 1997), mekanisme pengadaan dan distribusi seragam gratis di Makassar menunjukkan pola multi-stakeholder governance. Pemerintah kota tidak hanya bertindak sebagai regulator dan penyandang dana, tetapi juga menggandeng UMKK, dinas koperasi, sekolah, hingga orang tua. Namun, koordinasi antaraktor ini belum sepenuhnya berjalan optimal, terbukti dari keluhan terkait keterlambatan serta kebingungan orang tua mengenai ukuran dan jenis seragam yang diberikan.

Dengan demikian, mekanisme pengadaan dan distribusi seragam gratis di Kota Makassar menggambarkan dua wajah: di satu sisi merupakan inovasi kebijakan yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi lokal dengan kebijakan pendidikan, tetapi di sisi lain masih menghadapi persoalan klasik berupa keterlambatan, keterbatasan kapasitas, dan koordinasi antaraktor. Temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kapasitas tata kelola dan efektivitas jejaring aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya.

### **4.3.3. Pengawasan dan Kualitas**

Salah satu isu penting dalam implementasi program seragam gratis adalah bagaimana pemerintah memastikan kualitas barang yang diterima siswa sekaligus menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dari data lapangan, Dinas Pendidikan Kota Makassar membentuk tim pengawas internal yang bekerja sama dengan inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian. Pendampingan dari aparat penegak hukum menjadi strategi untuk meminimalisasi potensi penyimpangan, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan di mata publik.

Dari sisi kualitas, pemerintah telah menetapkan standar teknis yang cukup spesifik. Kain seragam, misalnya, harus memiliki gramasi minimal 130 gsm dengan komposisi poliester dominan agar lebih tahan lama. Setiap sampel kain yang diajukan penyedia diperiksa terlebih dahulu sebelum diproduksi massal. Selain itu, diterapkan mekanisme penukaran bila seragam cacat atau tidak sesuai ukuran. Praktik ini memperlihatkan adanya keseriusan pemerintah dalam menjaga mutu.

Namun, dalam pelaksanaan distribusi seragam gratis, masih ada beberapa sekolah yang terpaksa mengembalikan seragam karena tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Selain itu, jumlah seragam yang diterima oleh sekolah tidak sesuai dengan jumlah siswa baru, sehingga beberapa sekolah memilih untuk tidak membagikan seragam sampai seluruh siswa mendapatkan hak mereka. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar siswa. Padahal, telah ada stakeholder yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan distribusi seragam sesuai dengan jumlah dan kualitas yang telah ditentukan.

Jika dikaitkan dengan teori good governance (UNDP, 1997), elemen akuntabilitas dan transparansi cukup menonjol dalam program ini. Pendampingan oleh aparat hukum menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun kepercayaan publik dengan membuka ruang kontrol eksternal. Namun, dalam kerangka teori street-level bureaucracy (Lipsky, 1980), masih tampak celah ketika pengawasan di sekolah tidak merata. Beberapa guru mengaku pengukuran ukuran seragam masih menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua, misalnya perbedaan pemahaman tentang kode ukuran (S, M, L) dibanding lingkaran badan yang sebenarnya. Artinya, meskipun standar kualitas sudah ditetapkan secara formal, implementasi di tingkat sekolah tetap dipengaruhi oleh kapasitas aktor lapangan. Dengan demikian, pengawasan dan kualitas dalam program

seragam gratis Makassar dapat dilihat sebagai upaya kompromi antara idealitas regulasi dengan realitas di lapangan. Pemerintah berupaya menegakkan standar mutu dan akuntabilitas, tetapi keberhasilan penuh masih bergantung pada bagaimana kebijakan ini diadaptasi di tingkat sekolah dan diterima oleh orang tua siswa.

#### **4.4 Persepsi dan Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Seragam Gratis**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP di Kota Makassar pada dasarnya diterima secara positif oleh masyarakat, meskipun tetap menyisakan sejumlah catatan kritis. Para guru, misalnya, menilai program ini mampu mengurangi beban ekonomi orang tua dan sekaligus menciptakan kesetaraan antar siswa. Mereka menggarisbawahi bahwa seragam gratis dapat menghapus stigma perbedaan sosial yang biasanya terlihat dari variasi kualitas seragam yang dipakai siswa. Meski demikian, guru juga mengkritisi soal ketepatan waktu distribusi, karena sebagian sekolah baru menerima seragam ketika tahun ajaran sudah berjalan, sehingga tujuan utama program agak terganggu.

Orang tua siswa juga menunjukkan apresiasi terhadap program ini. Sebagian besar merasa terbantu karena biaya seragam yang cukup besar dapat dihemat. Namun, mereka juga menaruh harapan agar program tidak hanya menyediakan seragam putih-merah atau putih-biru, tetapi juga dilengkapi dengan seragam pramuka, olahraga, serta perlengkapan lain seperti tas dan sepatu. Bagi orang tua, seragam sekolah bukan sekadar pakaian formal, melainkan bagian dari kebutuhan anak untuk tampil percaya diri dan memenuhi standar identitas sekolah.

Di ruang publik yang lebih luas, program ini dipandang sebagai bentuk nyata komitmen politik Walikota dalam menepati janji kampanye. Banyak yang menilai program ini berpihak kepada rakyat kecil karena langsung menyentuh kebutuhan dasar. Namun, resistensi muncul dari sebagian sekolah yang sebelumnya terbiasa menjalin kerja sama dengan pihak konveksi untuk menjual seragam. Pemutusan praktik tersebut dianggap menghilangkan sumber keuntungan bagi sekolah, sehingga muncul kritik terselubung. Selain itu, di media sosial, masyarakat juga ramai membicarakan keterlambatan distribusi dan kualitas seragam, yang sebagian dinilai kurang sesuai ekspektasi.

Jika dianalisis lebih jauh, respon publik ini memperlihatkan pola penerimaan yang positif tetapi kritis. Di satu sisi, program seragam gratis memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana janji politik yang konkret. Di sisi lain, legitimasi kebijakan tetap bersifat kondisional, karena publik akan terus menilai kualitas barang, cakupan kebijakan, dan ketepatan waktu distribusi sebagai ukuran keberhasilan. Dengan kata lain, program ini telah memberi manfaat nyata, tetapi masih memerlukan penyempurnaan teknis dan penguatan legitimasi sosial agar bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Tabel 2. Ringkasan Respon Publik terhadap Program Seragam Gratis**

<b>Kelompok Responden</b>	<b>Respon Positif</b>	<b>Catatan/Kritik</b>
Guru	a. Program meringankan beban orang tua. b. Menciptakan kesetaraan antar siswa.	a. Keterlambatan distribusi. b. Tidak semua seragam (batik, olahraga) terpenuhi.
Orang Tua	a. Terbantu secara ekonomi. b. Mengurangi biaya masuk sekolah.	a. Harapan penambahan jenis seragam. b. Ingin perlengkapan lain (tas, sepatu).
Publik Umum	a. Program dipandang pro-rakyat. b. Komitmen politik Walikota terlihat.	a. Keluhan di media sosial terkait kualitas & waktu distribusi.

**Sumber: diolah dari hasil penelitian.**

Jika ditinjau dari teori analisis kelayakan kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Huffer et al. (2018) serta Weimer dan Vining (2017), temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Program Seragam Gratis di Kota Makassar memiliki dimensi kelayakan yang cukup kuat, meskipun belum sepenuhnya ideal.

Dari sisi teknis, mekanisme pengadaan menggunakan kontrak payung dan melibatkan UMKK lokal menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk menjamin distribusi seragam sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat. Sistem pendataan ukuran seragam juga dirancang untuk memastikan kesesuaian produk dengan kebutuhan siswa. Namun, hambatan masih muncul berupa keterlambatan distribusi, sehingga manfaat program tidak langsung dirasakan pada awal tahun ajaran. Hal ini menandakan bahwa kelayakan teknis program

berada pada tingkat cukup baik, tetapi membutuhkan peningkatan kapasitas produksi dan manajemen waktu yang lebih terencana. Secara ekonomi, alokasi anggaran sebesar Rp11–12 miliar untuk ±33 ribu siswa dapat dinilai efisien, mengingat manfaat yang dirasakan orang tua jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah. Beban ekonomi keluarga berkurang signifikan, sehingga program memperoleh apresiasi luas. Namun, sumber dana yang diperoleh dari efisiensi anggaran masih menyisakan kerentanan fiskal. Tanpa pengintegrasian dalam APBD reguler, keberlanjutan program berpotensi terganggu di tahun-tahun berikutnya.

Pada aspek legal dan operasional, program ini telah memiliki legitimasi formal melalui Perwali dan surat edaran Dinas Pendidikan. Pengawasan yang melibatkan inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian memperkuat akuntabilitas sekaligus mencegah praktik penyimpangan. Kendati demikian, resistensi muncul dari sebagian sekolah yang kehilangan peluang keuntungan dari penjualan seragam. Situasi ini memperlihatkan bahwa secara legal kebijakan sudah sah, tetapi secara operasional masih menghadapi dinamika sosial yang perlu dikelola dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik.

Jika dilihat dari tiga aspek utama menurut Weimer dan Vining (2017), yaitu efektivitas, efisiensi, dan keadilan, hasil penelitian menunjukkan hal yang menarik. Dari segi efektivitas, program berhasil meringankan beban ekonomi orang tua dan menciptakan kesetaraan di sekolah. Namun, ketidaktepatan waktu distribusi membuat tujuan agar siswa baru langsung mengenakan seragam sejak awal tahun ajaran belum sepenuhnya tercapai. Dari segi efisiensi, biaya per siswa relatif rasional dan manfaat sosial yang diperoleh cukup besar. Sementara itu, dari segi keadilan, kebijakan ini adil bagi siswa sekolah negeri karena berlaku menyeluruh tanpa membedakan latar belakang ekonomi, tetapi menyisakan kesenjangan dengan siswa sekolah swasta yang tidak tersentuh oleh program.

Dengan demikian, berdasarkan teori analisis kelayakan, program seragam gratis di Kota Makassar dapat dikategorikan layak secara sosial, ekonomi, dan legal, meskipun masih memiliki kekurangan pada aspek teknis, operasional, dan keberlanjutan fiskal. Program ini efektif dalam jangka pendek, efisien dalam penggunaan anggaran, serta relatif adil bagi siswa sekolah negeri. Namun, agar lebih berkelanjutan, pemerintah perlu memperkuat basis pembiayaan dalam

APBD reguler, memperbaiki manajemen distribusi, dan mengelola ekspektasi publik agar manfaat program tetap konsisten dengan tujuan awalnya.

#### **4.5 Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Kebijakan Seragam Gratis**

Kebijakan seragam gratis yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar merupakan program prioritas yang bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya pada saat penerimaan siswa baru di tingkat SD dan SMP. Meskipun program ini telah memberikan manfaat nyata bagi banyak keluarga, dalam implementasinya ditemukan sejumlah tantangan dan kendala yang cukup signifikan. Tantangan tersebut bersifat multidimensional, meliputi aspek teknis, administratif, sosial, hingga politik. Berikut uraian lengkap dari hasil wawancara lapangan:

##### **4.5.1 Keterlambatan distribusi seragam**

Salah satu kendala utama yang muncul dalam implementasi kebijakan seragam gratis adalah keterlambatan proses distribusi seragam kepada siswa baru. Berdasarkan informasi dari pejabat Dinas Pendidikan, mekanisme pengadaan dilakukan melalui sistem *kontrak payung* dengan memanfaatkan e-katalog, yang mewajibkan keterlibatan UMKM, koperasi, dan usaha kecil lokal sebagai penyedia. Kebijakan ini sebenarnya memiliki tujuan mulia, yaitu memberikan ruang pemberdayaan bagi pelaku usaha lokal agar dapat terlibat aktif dalam rantai pasok program pemerintah. Namun, di lapangan, pelaksanaannya menghadapi sejumlah hambatan. Banyak UMKM dan koperasi yang belum memiliki legalitas formal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mereka membutuhkan waktu tambahan untuk mengurus perizinan, konsolidasi, dan penyesuaian standar yang dipersyaratkan.

Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap keterlambatan proses produksi dan distribusi seragam. Akibatnya, pada saat tahun ajaran baru dimulai, sebagian besar seragam belum tersedia untuk dibagikan kepada siswa. Situasi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan orang tua siswa yang telah menaruh harapan besar pada program tersebut. Tidak sedikit orang tua akhirnya terpaksa membeli seragam sendiri demi memastikan anak-anak mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan layak. Pada titik ini, kebijakan yang seharusnya meringankan beban keluarga justru menimbulkan pemborosan, karena ada

keluarga yang akhirnya memiliki seragam ganda, baik yang dibeli secara pribadi maupun yang kemudian diterima dari pemerintah.

Dalam kerangka implementasi kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan apa yang disebut Pressman & Wildavsky (1984) sebagai *implementation gap*, yakni kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat perencanaan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Tujuan kebijakan sudah jelas, yaitu membantu orang tua dan meningkatkan kesetaraan akses pendidikan, namun keterlambatan distribusi mengurangi efektivitas dan bahkan menimbulkan masalah baru. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh “niat baik” dan regulasi yang kuat, tetapi juga kesiapan teknis dari para aktor pelaksana serta sinkronisasi antar-lembaga yang terlibat.

Lebih jauh, masalah keterlambatan ini juga memiliki implikasi psikologis dan sosial. Dari perspektif orang tua, keterlambatan menimbulkan rasa kecewa dan berkurangnya kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program prioritas. Sementara dari perspektif siswa, tidak semua anak mendapatkan pengalaman “seragam baru” secara bersamaan pada hari pertama sekolah, sehingga mengurangi makna simbolis dari seragam sebagai bentuk kesetaraan. Dengan kata lain, kebijakan yang seharusnya menumbuhkan rasa kebersamaan di kalangan siswa justru menghasilkan ketidakseragaman karena faktor teknis dalam distribusi.

Oleh sebab itu, keterlambatan distribusi dapat dilihat sebagai refleksi bahwa implementasi kebijakan publik membutuhkan keseimbangan antara tujuan pemberdayaan ekonomi lokal dengan kepastian layanan publik yang cepat dan tepat. Jika ke depan aspek pemberdayaan UMKM tetap dipertahankan, maka pemerintah perlu memastikan adanya pendampingan intensif, percepatan proses legalisasi, serta sistem monitoring yang ketat agar tidak terjadi penundaan yang berulang. Dengan cara itu, program seragam gratis dapat benar-benar mencapai tujuannya: membantu masyarakat secara nyata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

#### **4.5.2. Kompleksitas koordinasi lintas dinas dan Lembaga**

Program seragam gratis bukan hanya melibatkan Dinas Pendidikan sebagai instansi utama, melainkan juga membutuhkan koordinasi dengan berbagai dinas dan lembaga pendukung. Misalnya, Dinas Koperasi berperan

dalam mendata UMKM dan koperasi lokal yang dilibatkan sebagai penyedia; Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja bertanggung jawab atas aspek teknis proses tender serta konsolidasi penyedia; sementara Inspektorat, Kepolisian, dan Kejaksaan dilibatkan sebagai pendamping untuk menjamin akuntabilitas serta mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan anggaran. Banyaknya aktor yang terlibat dalam implementasi program ini di satu sisi memang memperkuat aspek transparansi dan kehati-hatian dalam tata kelola, namun di sisi lain menciptakan dinamika koordinasi yang cukup rumit.

Kompleksitas ini terlihat jelas dalam praktiknya. Setiap dinas atau lembaga memiliki prosedur, mekanisme birokrasi, dan standar operasional masing-masing. Akibatnya, proses pengambilan keputusan sering kali membutuhkan waktu lebih lama karena harus melalui berbagai tahap verifikasi dan persetujuan antarinstansi. Misalnya, keterlambatan dalam proses konsolidasi dengan penyedia kain, penjahit, dan koperasi terjadi karena data yang dihimpun Dinas Koperasi belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh ULP. Perbedaan prioritas antar lembaga memperbesar potensi *bottleneck*<sup>1</sup> dalam proses implementasi, sehingga distribusi seragam menjadi tidak serentak dan tidak sesuai target awal.

Secara akademis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *bureaucratic politics* (Allison & Halperin, 1972), yang menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya hasil dari rasionalitas tunggal, melainkan hasil interaksi dan negosiasi antaraktor birokrasi dengan kepentingan berbeda. Dalam konteks program seragam gratis, Dinas Pendidikan berfokus pada aspek layanan siswa, Dinas Koperasi menekankan pemberdayaan UMKM, sementara aparat penegak hukum lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan hukum. Perbedaan orientasi ini, meskipun masing-masing sah dan penting, dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang berimplikasi pada lambannya realisasi program.

Lebih jauh, koordinasi lintas lembaga yang kompleks ini juga menimbulkan biaya administrasi tambahan, baik dalam bentuk waktu maupun tenaga. Pertemuan lintas instansi harus dilakukan berulang kali untuk menyamakan

---

<sup>1</sup>Istilah *bottleneck* merujuk pada suatu titik atau bagian dalam suatu proses yang memperlambat atau menghambat kelancaran aliran atau penyelesaian keseluruhan proses tersebut. Dalam konteks ini, *bottleneck* mengacu pada hambatan yang terjadi dalam implementasi distribusi seragam, yang disebabkan oleh perbedaan prioritas antar lembaga, sehingga menyebabkan proses distribusi menjadi tidak serentak dan tidak sesuai dengan target awal.

persepsi, dan hal ini memerlukan energi birokrasi yang besar. Dalam literatur implementasi kebijakan, kondisi ini sering digambarkan sebagai fenomena *coordination failure*, yaitu ketika terlalu banyak aktor terlibat tanpa mekanisme koordinasi yang efektif, sehingga bukannya mempercepat, justru memperlambat pencapaian tujuan program (O'Toole, 1997).

Dari perspektif masyarakat, kompleksitas koordinasi ini tidak selalu dipahami secara detail. Bagi orang tua siswa, yang mereka lihat hanyalah hasil akhir berupa keterlambatan distribusi seragam. Mereka cenderung menilai bahwa pemerintah kota tidak responsif atau kurang serius dalam melaksanakan kebijakan. Padahal, persoalan mendasar berada pada tingkat koordinasi antarinstansi yang melibatkan banyak pihak. Ketidaksinkronan ini akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap efektivitas program.

Dengan demikian, meskipun pelibatan banyak dinas dan lembaga dimaksudkan untuk memperkuat transparansi dan menghindari penyalahgunaan kewenangan, namun tanpa mekanisme koordinasi yang solid, langkah tersebut justru menimbulkan konsekuensi berupa keterlambatan, inefisiensi, dan bahkan potensi konflik antarinstansi. Ke depan, diperlukan *policy coordination mechanism* yang lebih jelas, misalnya melalui pembentukan tim lintas sektor yang memiliki garis komando tunggal, agar proses pengadaan dan distribusi seragam dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan sesuai sasaran.

#### **4.5.3 Resistensi dari pihak sekolah**

Tantangan lain yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan seragam gratis adalah resistensi dari pihak sekolah. Sebelum kebijakan ini hadir, praktik penjualan seragam di sekolah sudah berlangsung lama dan nyaris menjadi tradisi yang tidak tertulis. Sekolah biasanya menjalin kerja sama dengan penyedia seragam atau konveksi tertentu yang kemudian memasok kebutuhan siswa baru. Dari praktik tersebut, pihak sekolah sering memperoleh "keuntungan tambahan" yang tidak tercatat dalam laporan resmi. Meskipun secara formal praktik ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, namun di lapangan ia dianggap "hal biasa" yang dibiarkan berlanjut dari tahun ke tahun.

Ketika kebijakan seragam gratis diberlakukan, pola lama ini harus dihapuskan. Pemerintah kota secara tegas melarang sekolah menjual seragam kepada siswa baru, bahkan mengancam dengan sanksi administratif hingga

pergantian kepala sekolah bagi mereka yang melanggar. Namun, perubahan tata kelola ini tidak diterima secara mulus. Sebagian sekolah menunjukkan resistensi dalam bentuk *perlawanan pasif*, misalnya dengan menyuarkan keluhan, memperlambat distribusi, atau bahkan tetap melakukan penjualan seragam meskipun sudah ada aturan larangan. Laporan masyarakat membuktikan bahwa masih terdapat sekolah yang mencoba mempertahankan praktik lama, meskipun secara terang-terangan melanggar kebijakan pemerintah.

Fenomena resistensi ini dapat dipahami melalui perspektif *institutionalism* dalam ilmu administrasi publik. North (1990) menegaskan bahwa kebiasaan, norma, dan praktik yang sudah lama mengakar sering kali menciptakan *path dependency*<sup>2</sup>, yakni kecenderungan untuk mempertahankan pola lama meskipun sudah tidak relevan. Dalam konteks kebijakan seragam gratis, penjualan seragam di sekolah telah lama menjadi sumber pendapatan tambahan yang “menghidupi” kepentingan tertentu. Maka ketika kebijakan baru datang dan memutus aliran manfaat tersebut, resistensi muncul sebagai konsekuensi alami dari perubahan institusional.

Lebih jauh, resistensi ini juga menggambarkan adanya konflik kepentingan antara tujuan kebijakan publik dengan praktik ekonomi sekolah. Pemerintah berusaha membangun sistem pendidikan yang transparan, bebas pungutan liar, dan meringankan beban orang tua. Sebaliknya, pihak sekolah melihat adanya kerugian karena kehilangan sumber pendapatan informal yang selama ini membantu operasional nonformal atau bahkan keuntungan individu. Pertentangan kepentingan ini, jika tidak ditangani dengan tegas, berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan.

Dari sudut pandang manajemen perubahan (*change management*), resistensi pihak sekolah dapat dikategorikan sebagai bentuk *organizational inertia*, yaitu kecenderungan organisasi untuk menolak perubahan karena merasa nyaman dengan pola lama. Menurut Kotter (1996), perubahan hanya bisa berjalan efektif jika ada kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang jelas, dan insentif yang seimbang bagi aktor-aktor yang terdampak. Dalam kasus ini, sekolah sebagai pelaksana kebijakan membutuhkan pemahaman bahwa program seragam gratis

---

<sup>2</sup> Path dependency adalah kecenderungan untuk mempertahankan pola atau praktik lama meskipun sudah tidak relevan, karena kebiasaan atau keputusan masa lalu membentuk jalur yang sulit untuk diubah.

bukan semata kebijakan politis, melainkan bagian dari upaya perbaikan tata kelola pendidikan.

Selain itu, resistensi juga berdampak pada persepsi masyarakat. Orang tua siswa sering kali bingung menghadapi dualisme aturan: di satu sisi pemerintah melarang penjualan seragam di sekolah, tetapi di sisi lain mereka masih menemukan praktik tersebut. Kebingungan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan. Jika tidak ada penegakan hukum yang konsisten, maka program seragam gratis akan kehilangan legitimasi di mata publik.

Dengan demikian, resistensi sekolah terhadap kebijakan seragam gratis bukan hanya sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan perubahan budaya organisasi. Oleh karena itu, strategi implementasi ke depan harus mencakup mekanisme sosialisasi yang lebih masif, pengawasan yang ketat, serta pemberian alternatif solusi agar pihak sekolah tidak merasa kehilangan ruang finansial. Dengan cara itu, kebijakan seragam gratis tidak hanya dipatuhi secara formal, tetapi juga diterima secara substantif oleh semua pemangku kepentingan.

#### **4.5.4 Standarisasi kualitas dan ukuran seragam**

Selain persoalan distribusi dan koordinasi, salah satu kendala teknis yang cukup menonjol dalam pelaksanaan kebijakan seragam gratis adalah masalah standarisasi kualitas dan ukuran seragam. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan telah menetapkan standar tertentu, misalnya gramasi kain minimal 130 serta penggunaan bahan poliester yang dianggap lebih kuat, awet, dan sesuai dengan kebutuhan anak sekolah. Standarisasi ini penting untuk memastikan bahwa seragam yang diberikan memiliki kualitas baik dan dapat dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi siswa dan orang tua.

Meskipun standar tersebut telah ditetapkan, dalam praktiknya, beberapa hasil produksi seragam yang didistribusikan ke sekolah masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan desain yang ditetapkan. Salah satu contohnya adalah rok untuk siswa perempuan yang seharusnya menggunakan model plisket, sesuai dengan peraturan resmi sekolah. Akan tetapi, yang diterima adalah rok dengan model rempel yang memiliki dua belahan, yang seharusnya dihindari karena

menyerupai model rok span yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan distribusi seragam.

Ketidaksesuaian desain ini menimbulkan keluhan dari guru maupun orang tua karena dianggap tidak konsisten dengan aturan seragam sekolah. Bagi orang tua, masalah ini tidak sekadar soal estetika, tetapi juga soal kepatuhan terhadap aturan sekolah yang mewajibkan model seragam tertentu.

Selain persoalan desain, distribusi seragam berdasarkan ukuran siswa juga tidak sepenuhnya berjalan mulus. Data ukuran biasanya diperoleh dari formulir pendaftaran ulang siswa baru. Namun, data tersebut sering kali tidak akurat karena orang tua atau siswa mengisi ukuran secara perkiraan, bukan melalui pengukuran langsung. Akibatnya, ada kasus seragam yang kebesaran atau terlalu kecil, sehingga tidak nyaman dipakai oleh siswa. Beberapa orang tua bahkan harus kembali ke sekolah atau ke penyedia untuk menukar seragam, yang tentu menambah beban waktu dan tenaga. Kondisi ini membuat proses distribusi menjadi lebih lambat dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

Dari perspektif implementasi kebijakan publik, persoalan standarisasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *policy design* dengan *policy execution*. Desain kebijakan yang ideal di atas kertas ternyata sulit diwujudkan dalam realitas lapangan karena keterbatasan kemampuan penyedia dalam memproduksi seragam dengan standar seragam yang seragam (*uniformity of standard*). Dalam literatur manajemen kualitas, fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori *Total Quality Management* (Deming, 1986), yang menekankan pentingnya konsistensi mutu produk dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna akhir. Jika penyedia tidak memiliki sistem pengendalian mutu yang ketat, maka variasi kualitas produk akan sulit dihindari.

Lebih jauh, masalah standarisasi ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bagi orang tua, kualitas kain yang tipis atau cepat rusak setelah dicuci menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam mengawasi jalannya program. Ketidaksesuaian ukuran dan model juga dipersepsikan sebagai bentuk kurangnya kontrol dari pihak pemerintah terhadap penyedia. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mengurangi legitimasi program seragam gratis di mata masyarakat, meskipun tujuan utamanya adalah mulia dan sangat dibutuhkan.

Dari sisi siswa, seragam yang tidak sesuai ukuran tentu memengaruhi kenyamanan mereka dalam beraktivitas di sekolah. Anak yang mengenakan seragam kebesaran atau kekecilan bisa merasa tidak percaya diri, dan hal ini dapat berpengaruh pada aspek psikologis serta interaksi sosial di sekolah. Dengan demikian, masalah kualitas dan ukuran seragam tidak dapat dipandang remeh karena implikasinya menjangkau dimensi ekonomi, sosial, hingga psikologis siswa.

Ke depan, perbaikan mekanisme standarisasi menjadi hal yang mendesak. Pemerintah dapat mewajibkan penyedia untuk melakukan pengukuran langsung kepada siswa baru atau setidaknya menyediakan sistem verifikasi ulang ukuran sebelum produksi massal dilakukan. Selain itu, perlu ada tim pengawas kualitas yang memastikan bahwa seragam yang diproduksi sesuai dengan standar bahan, model, dan ukuran yang telah ditentukan. Dengan demikian, distribusi seragam tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tepat kualitas, sehingga kepuasan masyarakat terhadap program semakin meningkat.

#### **4.5.5. Keterbatasan jumlah seragam yang diberikan**

Selain masalah distribusi dan standarisasi, keterbatasan jumlah seragam yang diberikan juga menjadi salah satu kendala yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah Kota Makassar melalui kebijakan ini hanya mampu menyediakan dua pasang seragam untuk setiap siswa baru di tingkat SD dan SMP. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh faktor anggaran daerah yang terbatas serta kebutuhan pembiayaan di sektor lain yang juga mendesak.

Padahal, jika mengacu pada standar kebutuhan siswa, setiap anak minimal harus memiliki lima jenis seragam sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu seragam nasional (putih-merah untuk SD dan putih-biru untuk SMP), seragam pramuka, seragam olahraga, seragam batik atau khas daerah, serta seragam identitas sekolah tertentu. Dengan hanya dua pasang seragam, orang tua tetap harus menanggung biaya tambahan untuk membeli seragam lainnya. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, biaya tambahan ini masih dirasakan cukup berat, sehingga kebijakan seragam gratis belum sepenuhnya menghapus beban biaya non-SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang harus mereka keluarkan.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *policy adequacy*, yakni sejauh mana kebijakan publik benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Program seragam gratis memang sudah membantu, namun belum sepenuhnya memadai karena tidak menutupi seluruh jenis seragam yang diwajibkan sekolah. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan kemampuan pemerintah. Masyarakat cenderung menilai bahwa jika pemerintah sudah berkomitmen memberikan seragam gratis, maka seharusnya mencakup seluruh kebutuhan standar, bukan hanya sebagian.

Selain itu, keterbatasan jumlah seragam juga memiliki implikasi praktis bagi siswa. Anak-anak yang hanya memiliki dua pasang seragam cenderung harus lebih sering mencuci seragamnya, yang berpotensi membuat seragam cepat rusak atau luntur. Kondisi ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi siswa, terutama ketika harus mengenakan seragam yang kualitasnya sudah menurun dalam jangka waktu singkat. Beberapa orang tua juga menyampaikan bahwa dengan jumlah seragam terbatas, anak-anak terpaksa menggunakan seragam yang sama berulang kali meski belum sepenuhnya bersih, sehingga memengaruhi kebersihan dan rasa percaya diri mereka di sekolah.

Dari sisi orang tua, keterbatasan jumlah seragam menimbulkan ekspektasi baru terhadap pemerintah daerah. Banyak yang berharap agar di tahun-tahun mendatang jumlah seragam yang diberikan dapat ditambah, minimal tiga pasang untuk setiap siswa, atau bahkan mencakup lima jenis seragam yang diwajibkan. Aspirasi ini muncul bukan sekadar karena keinginan, tetapi berdasarkan kebutuhan riil yang mereka hadapi setiap tahun ajaran baru.

Secara lebih luas, keterbatasan jumlah seragam juga memperlihatkan adanya dilema kebijakan publik antara prinsip pemerataan (*equity*) dan kecukupan (*adequacy*). Pemerintah berusaha agar seluruh siswa baru mendapatkan seragam, sehingga memutuskan untuk membatasi jumlah seragam agar anggaran dapat menjangkau lebih banyak penerima. Namun, langkah ini membuat bantuan yang diterima setiap anak belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan. Dilema ini menunjukkan pentingnya strategi alokasi anggaran yang lebih inovatif, misalnya melalui skema multi-sumber pembiayaan, keterlibatan CSR (*Corporate Social Responsibility*), atau kerja sama dengan pemerintah provinsi untuk menambah jumlah seragam.

Dengan demikian, keterbatasan jumlah seragam bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah strategis dalam manajemen kebijakan pendidikan. Jika tidak diantisipasi dengan perencanaan anggaran yang lebih baik, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat dan menurunkan legitimasi program. Oleh karena itu, ke depan, pemerintah perlu menimbang opsi peningkatan jumlah seragam secara bertahap agar tujuan kebijakan seragam gratis benar-benar tercapai, yaitu meringankan beban orang tua sekaligus menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh siswa.

#### **4.5.6 Ketergantungan pada ketersediaan anggaran**

Tantangan terakhir yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan seragam gratis adalah keberlanjutannya dari sisi fiskal. Program ini memang bisa terealisasi pada tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran nasional yang sebagian dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan fiskal pusat yang memberi ruang lebih besar kepada daerah membuka peluang bagi Pemerintah Kota Makassar untuk membiayai program seragam gratis secara penuh. Namun, kondisi tersebut belum tentu berulang pada tahun-tahun berikutnya. Stabilitas fiskal nasional dan prioritas kebijakan pemerintah pusat dapat berubah sesuai dinamika ekonomi makro, sehingga alokasi dana ke daerah juga berpotensi mengalami penyesuaian.

Dalam jangka panjang, program seragam gratis masih sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Komitmen politik kepala daerah juga menjadi faktor penentu keberlanjutan program ini. Jika wali kota atau pejabat berikutnya memiliki prioritas pembangunan berbeda, maka alokasi anggaran untuk seragam gratis bisa saja dikurangi atau bahkan dihentikan. Fenomena ini sesuai dengan literatur *political budget cycle*, di mana alokasi anggaran publik sering kali mengikuti orientasi politik dan kepentingan elektoral dari pejabat yang berkuasa (Nordhaus, 1975). Dengan demikian, meskipun saat ini program berjalan dengan baik, masa depannya tetap rentan terhadap perubahan kepemimpinan politik maupun kondisi fiskal.

Kerentanan ini menegaskan bahwa keberlanjutan kebijakan seragam gratis membutuhkan strategi perencanaan keuangan yang lebih matang dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu merancang skema pembiayaan jangka panjang yang tidak hanya mengandalkan APBD tahunan, tetapi juga membuka

peluang dukungan dari berbagai sumber, seperti kerja sama dengan sektor swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), bantuan dari pemerintah provinsi, atau integrasi dengan program perlindungan sosial lainnya. Selain itu, pelembagaan program dalam bentuk peraturan daerah (Perda) juga sangat penting untuk menjamin kontinuitas, sehingga keberlanjutan program tidak sepenuhnya bergantung pada preferensi politik kepala daerah yang sedang menjabat.

Dengan kata lain, ketergantungan pada ketersediaan anggaran menunjukkan bahwa meskipun kebijakan seragam gratis mendapat apresiasi positif dari masyarakat, ia masih menghadapi tantangan serius dalam hal *policy sustainability*. Tanpa adanya perencanaan fiskal yang kuat dan perlindungan regulatif yang jelas, program ini berisiko menjadi kebijakan jangka pendek yang hilang ketika terjadi perubahan politik atau keterbatasan fiskal daerah. Oleh karena itu, memastikan keberlanjutan anggaran adalah prasyarat utama agar program seragam gratis tidak hanya menjadi proyek populis, tetapi benar-benar menjadi instrumen kebijakan pendidikan yang berkelanjutan.

#### **4.6. Dampak Awal Program Kebijakan Seragam Gratis**

Pelaksanaan kebijakan seragam gratis di Kota Makassar membawa sejumlah dampak awal yang dapat dirasakan baik oleh orang tua siswa, peserta didik, maupun pihak sekolah. Dampak ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga meluas ke dimensi psikologis, sosial, dan tata kelola pendidikan. Hasil wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa program ini memiliki implikasi nyata meskipun masih menyisakan beberapa catatan kritis.

##### **4.6.1 Pengurangan beban ekonomi keluarga**

Dampak paling nyata dari kebijakan ini adalah berkurangnya beban ekonomi keluarga, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak lebih dari satu yang serentak masuk sekolah dasar dan menengah pertama. Sebelum adanya program, biaya seragam menjadi salah satu pengeluaran besar pada awal tahun ajaran baru, di samping pembelian buku, alat tulis, dan kebutuhan lain. Dengan adanya seragam gratis, sebagian beban ini berkurang sehingga anggaran keluarga dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, misalnya biaya transportasi, uang jajan anak, atau kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Bagi keluarga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, kebijakan ini dianggap sebagai kabar baik, karena mampu mengurangi beban finansial yang selama ini cukup berat.

Secara akademis, hal ini sesuai dengan teori *public policy as redistribution* (Lowi, 1972), di mana kebijakan publik berfungsi mengalihkan sumber daya negara untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Kebijakan seragam gratis dapat dipandang sebagai instrumen redistribusi fiskal yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat memperkuat legitimasi pemerintah di mata warganya.

#### **4.6.2 Dampak psikologis bagi siswa**

Selain aspek ekonomi, kebijakan seragam gratis juga membawa dampak positif secara psikologis. Anak-anak yang menerima seragam merasa lebih percaya diri dan nyaman karena seluruh siswa baru menggunakan seragam yang sama, sehingga tidak ada perbedaan mencolok antara anak dari keluarga kaya dan miskin. Seragam menjadi simbol kesetaraan sosial yang menumbuhkan rasa kebersamaan di lingkungan sekolah. Dalam jangka pendek, hal ini meningkatkan rasa bangga sebagai siswa baru sekaligus memotivasi mereka untuk bersekolah dengan penuh semangat. Meskipun guru menilai motivasi belajar siswa lebih dipengaruhi oleh faktor internal dan peran guru, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemakaian seragam baru dapat meningkatkan antusiasme anak dalam bersekolah.

Kebijakan seragam gratis memiliki pengaruh langsung terhadap meningkatnya minat bersekolah dan motivasi sekolah siswa baru, terutama bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dengan dihapuskannya beban biaya pembelian seragam, orang tua merasa lebih ringan dalam menyekolahkan anak, sementara siswa mengalami peningkatan rasa percaya diri karena tidak perlu khawatir akan penampilan atau perbedaan status sosial. Seragam baru menciptakan pengalaman emosional positif—anak merasa diterima sepenuhnya sebagai bagian dari komunitas sekolah, dan seragam menjadi simbol kesetaraan sosial yang menumbuhkan rasa kebersamaan. Dalam konteks psikologis, seragam berfungsi sebagai stimulus eksternal yang mendorong kehadiran, partisipasi, dan antusiasme bersekolah, karena sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman tanpa rasa minder. Kebijakan ini juga

meningkatkan semangat bersekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya sering merasa canggung atau malu karena tidak memiliki seragam layak. Keseragaman pakaian menumbuhkan rasa memiliki (*belongingness*) dan kebanggaan sebagai bagian dari kelompok yang setara. Guru menilai motivasi sekolah lebih dipengaruhi oleh faktor internal, namun lingkungan psikologis yang terbentuk dari kebijakan ini menciptakan kondisi kondusif bagi tumbuhnya motivasi eksternal dan intrinsik siswa untuk hadir serta berpartisipasi aktif di sekolah.

Hasil wawancara dengan beberapa orang tua siswa di Kota Makassar menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak nyata pada kesiapan dan semangat anak untuk bersekolah. Seorang ibu dari siswa SD negeri di Kota Makassar menyampaikan bahwa anaknya “lebih semangat berangkat ke sekolah karena punya seragam baru seperti teman-temannya, jadi tidak malu lagi dan makin rajin masuk sekolah.” Beberapa orang tua lainnya juga menuturkan bahwa program seragam gratis meringankan beban pengeluaran keluarga dan menumbuhkan rasa bangga anak saat mengenakan seragam sekolah. Dari perspektif guru, dampaknya juga terlihat jelas. Seorang guru wali kelas di SD negeri di Kota Makassar menyebutkan bahwa “anak-anak terlihat lebih percaya diri, lebih aktif mengikuti kegiatan sekolah, dan lebih bersemangat di pagi hari.” Guru lain menambahkan bahwa “dengan seragam yang sama, suasana kelas lebih harmonis, dan tidak ada lagi rasa minder bagi anak-anak dari keluarga sederhana.” Data ini memperlihatkan bahwa kebijakan seragam gratis bukan hanya intervensi ekonomi, tetapi juga penguat psikologis yang meningkatkan rasa percaya diri, semangat, dan motivasi sekolah terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, kebijakan seragam gratis bukan sekadar bantuan material, melainkan instrumen sosial dan psikologis yang menurunkan hambatan ekonomi, menumbuhkan rasa aman serta kesetaraan sosial, dan pada akhirnya memperkuat semangat serta motivasi sekolah siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

#### **4.6.3 Peningkatan transparansi tata kelola sekolah**

Kebijakan seragam gratis juga mendorong perubahan positif dalam tata kelola sekolah. Dengan adanya larangan penjualan seragam di sekolah, praktik pungutan tidak resmi yang selama ini membebani orang tua mulai berkurang. Guru

dan kepala sekolah tidak lagi dapat menjadikan seragam sebagai sumber "pemasukan tambahan", karena distribusi seragam sudah sepenuhnya ditangani pemerintah. Hal ini menumbuhkan transparansi sekaligus membatasi ruang praktik penyalahgunaan kewenangan yang sering muncul pada masa penerimaan siswa baru.

Dari perspektif *good governance*, kebijakan ini mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelayanan publik. Teori *principal-agent* juga relevan di sini: sekolah sebagai agen negara sebelumnya sering bertindak oportunistik dalam hal seragam, namun intervensi pemerintah daerah melalui program seragam gratis mampu menekan perilaku disfungsi tersebut.

#### **4.6.4 Dampak terhadap hubungan sekolah dan orang tua**

Kebijakan ini juga memengaruhi hubungan antara sekolah dengan orang tua. Sebagian orang tua merasa lebih dihargai dan diperhatikan karena kebutuhan dasar anak mereka dipenuhi pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri meningkat karena program ini dipandang sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. Namun, di sisi lain, masih ada orang tua yang mengeluhkan keterlambatan distribusi, sehingga hubungan dengan pihak sekolah sedikit tegang karena dianggap kurang tanggap dalam memberikan informasi kapan seragam akan dibagikan. Secara akademik, hal ini sejalan dengan pendekatan *stakeholder theory*, di mana hubungan antara pemerintah, sekolah, dan orang tua dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan publik mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Jika ekspektasi terpenuhi, kepercayaan meningkat; jika tidak, ketidakpuasan muncul. Hal ini menegaskan pentingnya komunikasi publik yang efektif sebagai bagian dari implementasi kebijakan.

#### **4.6.5 Efek jangka pendek terhadap partisipasi sekolah**

Beberapa responden mengindikasikan bahwa program ini berpotensi meningkatkan angka partisipasi sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang ekonominya rentan. Dengan berkurangnya beban biaya, orang tua yang sebelumnya ragu menyekolahkan anak karena alasan finansial menjadi lebih yakin untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah negeri. Meskipun data statistik jangka panjang masih dibutuhkan, indikasi awal menunjukkan bahwa program

seragam gratis mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah.

Dalam perspektif *human capital theory* (Becker, 1993), setiap kebijakan yang mempermudah akses ke pendidikan akan meningkatkan akumulasi modal manusia suatu daerah. Seragam gratis dapat dipandang sebagai investasi awal yang memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap berada di jalur pendidikan, sehingga dalam jangka panjang meningkatkan kualitas sumber daya manusia kota.

#### **4.6.5 Pemanfaatan ekonomi lokal**

Selain dampak sosial dan psikologis, kebijakan seragam gratis juga memberikan efek ekonomi pada tingkat lokal. Program ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) di Kota Makassar, terutama di sektor konveksi, penjahit, dan penyedia bahan tekstil. Pemerintah daerah yang melibatkan produsen lokal dalam proses pengadaan seragam turut mendorong sirkulasi ekonomi di wilayah setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pelaku usaha, kebijakan ini membuka lapangan kerja musiman dan meningkatkan omzet mereka secara signifikan selama masa produksi seragam. Para penjahit kecil yang sebelumnya hanya menerima pesanan individu kini mendapatkan kontrak kerja dalam jumlah besar, baik secara langsung maupun melalui sistem subkontrak. Hal ini memperlihatkan bahwa program seragam gratis tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pendidikan, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi lokal yang memperkuat ekosistem usaha masyarakat.

Dari perspektif local economic empowerment, kebijakan ini selaras dengan prinsip penguatan kapasitas ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal. Dengan mengoptimalkan produksi seragam di tingkat lokal, pemerintah daerah berperan dalam memperpendek rantai pasok, menghemat biaya distribusi, serta memastikan kualitas produk lebih terpantau. Selain itu, kolaborasi antara dinas pendidikan dan pelaku UMKM meningkatkan sinergi antara kebijakan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

#### **4.7 Harapan dan Keberlanjutan Kebijakan Seragam Gratis**

Meskipun implementasi awal kebijakan seragam gratis masih menghadapi berbagai kendala, masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki harapan besar terhadap keberlanjutan program ini. Harapan tersebut mencakup peningkatan kualitas, perluasan cakupan, serta konsistensi politik dan anggaran agar kebijakan ini tidak berhenti hanya sebagai proyek jangka pendek.

##### **4.7.1 Harapan peningkatan jumlah dan jenis seragam**

Mayoritas orang tua mengungkapkan harapan agar jumlah seragam yang diberikan dalam program seragam gratis dapat ditambah. Saat ini, setiap siswa hanya menerima dua pasang seragam, yang dianggap masih kurang untuk memenuhi seluruh kebutuhan standar seragam. Beberapa orang tua berharap agar jumlah seragam ditingkatkan menjadi tiga pasang, atau bahkan lima pasang. Hal ini akan mencakup seluruh jenis seragam yang diperlukan oleh siswa, termasuk seragam olahraga, pramuka, dan batik sekolah. Dengan adanya tambahan seragam ini, diharapkan program tersebut dapat mencakup seluruh kebutuhan siswa selama setahun penuh.

Selain itu, kebutuhan seragam yang lebih banyak juga sejalan dengan harapan orang tua yang menginginkan kebijakan ini dapat lebih komprehensif dalam mengurangi beban finansial mereka. Meskipun program seragam gratis sudah memberikan bantuan yang signifikan, banyak orang tua yang merasa terbebani dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk membeli jenis seragam lain yang tidak disediakan oleh pemerintah, seperti seragam olahraga dan batik sekolah. Keterbatasan jumlah seragam yang diberikan membuat mereka terpaksa membeli seragam tambahan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.

Penambahan jumlah dan jenis seragam ini bukan hanya soal mengurangi beban ekonomi orang tua, tetapi juga meningkatkan efektivitas program dalam menjawab kebutuhan nyata siswa. Dalam banyak kasus, siswa tidak dapat mengikuti semua kegiatan sekolah karena kekurangan seragam tertentu, seperti seragam olahraga atau pramuka. Dengan pemenuhan seragam yang lebih lengkap, siswa akan lebih siap mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan peranannya di sekolah tanpa harus bergantung pada seragam yang dibeli secara mandiri oleh orang tua.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini akan memiliki dampak positif terhadap kesetaraan antar siswa. Dalam beberapa kasus, ketidaklengkapan seragam dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial di kalangan siswa, yang dapat memengaruhi rasa percaya diri mereka. Dengan menyediakan semua jenis seragam yang diperlukan, program ini tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan merata, di mana setiap siswa memiliki akses yang setara terhadap fasilitas dan kegiatan sekolah.

Secara keseluruhan, penambahan jumlah dan jenis seragam akan memperkuat tujuan utama dari program ini, yaitu untuk meringankan beban orang tua dan memastikan setiap siswa mendapatkan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran mereka. Kebijakan yang lebih komprehensif ini akan memastikan bahwa program seragam gratis tidak hanya membantu dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif dalam jangka panjang, dengan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh siswa.

#### **4.7.2 Harapan terhadap peningkatan kualitas seragam**

Selain persoalan jumlah, kualitas seragam juga menjadi perhatian utama masyarakat. Sebagian orang tua memang mengakui bahwa kain yang digunakan dalam program seragam gratis tergolong cukup baik untuk ukuran bantuan pemerintah, namun ada pula yang menilai kualitas tersebut masih perlu ditingkatkan agar seragam lebih awet dan tahan lama. Hal ini wajar mengingat seragam sekolah digunakan hampir setiap hari dan sering dicuci, sehingga membutuhkan bahan dengan standar kualitas tinggi. Seragam yang cepat luntur atau mudah robek akan menimbulkan beban tambahan bagi orang tua karena mereka harus membeli seragam pengganti. Dengan kata lain, kualitas seragam yang baik tidak hanya menyangkut kepuasan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas kebijakan dalam mengurangi beban ekonomi keluarga.

Selain bahan kain, standar jahitan dan model seragam juga menjadi aspek yang banyak disorot. Dari hasil wawancara, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara model seragam yang dihasilkan penyedia dengan standar yang berlaku di sekolah, misalnya perbedaan pada rok siswa perempuan yang seharusnya berplisket namun diproduksi dengan model rempel. Ketidaksesuaian ini tidak

hanya menimbulkan keluhan dari orang tua dan guru, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam mengawasi kualitas program. Oleh karena itu, harapan masyarakat tidak hanya terbatas pada penggunaan bahan kain yang lebih baik, tetapi juga pada pengawasan ketat agar model seragam benar-benar seragam dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah.

Dari perspektif kebijakan publik, peningkatan kualitas seragam juga memiliki makna strategis dalam membangun legitimasi program. Masyarakat akan menilai bahwa program seragam gratis bukan sekadar kebijakan populis, tetapi benar-benar dirancang dengan memperhatikan kebutuhan riil siswa. Jika kualitas seragam baik, awet, dan sesuai standar, maka orang tua merasa bahwa pemerintah serius dalam mengelola program dan tidak sekadar menjalankan formalitas. Dengan begitu, program ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta memperkuat citra positif tata kelola pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu melibatkan mekanisme pengendalian mutu (*quality control*) yang lebih ketat terhadap penyedia, termasuk evaluasi berkala dan sanksi bagi penyedia yang tidak memenuhi standar kualitas.

#### **4.7.3 Harapan distribusi lebih cepat dan tepat waktu**

Salah satu harapan terbesar masyarakat terhadap program seragam gratis adalah terkait ketepatan waktu distribusi. Banyak orang tua menilai bahwa idealnya seragam sudah tersedia dan dibagikan sebelum tahun ajaran baru dimulai, sehingga anak-anak dapat langsung mengenakan seragam pada hari pertama masuk sekolah. Hal ini penting karena seragam sekolah bukan sekadar pakaian formal, melainkan juga simbol identitas dan kesetaraan bagi siswa baru. Jika distribusi dilakukan tepat waktu, maka anak-anak tidak perlu merasa berbeda atau minder ketika masuk sekolah hanya karena belum memiliki seragam resmi. Oleh karena itu, harapan masyarakat ini mencerminkan kebutuhan mendasar yang tidak hanya praktis, tetapi juga sarat dengan makna psikologis dan sosial.

Keterlambatan distribusi yang terjadi pada tahun sebelumnya menimbulkan sejumlah masalah. Orang tua terpaksa membeli seragam tambahan secara mandiri agar anak-anak mereka tetap dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Kondisi ini menimbulkan beban ekonomi baru yang seharusnya bisa

dihindari apabila distribusi dilakukan sesuai jadwal. Beberapa orang tua juga menyampaikan keluhan bahwa seragam bantuan pemerintah baru datang setelah mereka mengeluarkan biaya sendiri, sehingga program ini dianggap kurang efektif dan menimbulkan pemborosan. Akibatnya, meskipun niat pemerintah baik, manfaat program menjadi tidak optimal di mata masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa waktu distribusi memiliki peran krusial dalam menentukan sejauh mana program ini benar-benar dirasakan sebagai solusi.

Untuk itu, masyarakat berharap adanya perbaikan menyeluruh pada sistem pengadaan dan distribusi. Pemerintah daerah perlu memperkuat konsolidasi dengan penyedia, mempercepat proses administrasi di Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta meningkatkan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar rantai birokrasi tidak lagi memperlambat pelaksanaan. Dalam literatur kebijakan publik, hal ini berkaitan dengan efektivitas implementasi (*policy implementation effectiveness*), di mana kejelasan jadwal, koordinasi antar-aktor, serta kapasitas manajerial menjadi faktor kunci keberhasilan. Jika perbaikan ini dilakukan, maka distribusi seragam dapat berjalan lebih cepat dan tepat waktu, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik.

#### **4.7.4 Harapan terhadap perluasan sasaran**

Sebagian masyarakat menyampaikan harapan agar program seragam gratis tidak hanya terbatas bagi siswa di sekolah negeri, tetapi juga menjangkau sekolah swasta, terutama sekolah swasta kecil yang biaya pendidikannya relatif rendah dan banyak menampung anak dari keluarga kurang mampu. Selama ini, terdapat kesan bahwa siswa di sekolah swasta tidak mendapat perhatian yang sama, padahal kondisi ekonomi orang tua mereka sering kali tidak jauh berbeda dengan siswa di sekolah negeri. Dengan memperluas cakupan sasaran, program seragam gratis akan lebih inklusif dan mencerminkan semangat keadilan sosial dalam dunia pendidikan.

Harapan ini muncul karena sekolah swasta kecil, khususnya yang berada di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah, sering menjadi pilihan orang tua yang tidak lolos seleksi masuk sekolah negeri. Biaya di sekolah tersebut mungkin lebih murah dibanding sekolah swasta besar atau favorit, namun tetap menjadi beban yang signifikan bagi keluarga pra-sejahtera. Dalam konteks ini, kebijakan

seragam gratis yang hanya menyasar sekolah negeri dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perluasan program ke sekolah swasta kecil akan memperkuat peran pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh anak, tanpa memandang status sekolahnya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dengan layak.

Namun demikian, perluasan sasaran juga harus diikuti dengan mekanisme seleksi dan pengawasan yang ketat agar bantuan tidak salah sasaran. Ada kekhawatiran bahwa tanpa regulasi yang jelas, sekolah swasta elit yang sebenarnya memiliki sumber daya memadai bisa saja ikut memanfaatkan kebijakan ini. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun kriteria khusus, misalnya dengan mengutamakan sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga kurang mampu, atau dengan melakukan verifikasi data ekonomi orang tua penerima. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan seragam gratis tidak hanya meluas cakupannya, tetapi juga tetap tepat sasaran dan benar-benar mendukung kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

#### **4.7.5 Harapan terhadap keberlanjutan politik dan anggaran**

Salah satu harapan besar masyarakat terhadap program seragam gratis adalah keberlanjutannya dalam jangka panjang. Banyak orang tua menyatakan kekhawatiran bahwa program ini hanya akan bertahan selama masa jabatan wali kota tertentu, lalu dihentikan oleh penggantinya karena adanya perubahan prioritas politik atau perbedaan visi pembangunan. Kekhawatiran ini wajar, sebab dalam praktik kebijakan publik di Indonesia sering ditemukan program populer yang berhenti di tengah jalan ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Oleh karena itu, masyarakat menilai bahwa seragam gratis sebaiknya tidak dipandang semata-mata sebagai kebijakan politis, melainkan sebagai kebutuhan dasar pendidikan yang harus dijamin secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah.

Keberlanjutan program ini juga sangat terkait dengan stabilitas fiskal daerah. Jika kondisi keuangan daerah terganggu akibat penurunan pendapatan asli daerah (PAD) atau adanya kebutuhan prioritas lain seperti infrastruktur dan kesehatan, maka alokasi anggaran untuk seragam gratis bisa saja dikurangi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran baru, karena masyarakat menilai bahwa konsistensi pendanaan menjadi kunci agar program benar-benar memberikan manfaat jangka panjang. Dalam literatur kebijakan publik, hal ini berkaitan dengan

konsep *policy sustainability*, yaitu sejauh mana sebuah kebijakan mampu bertahan menghadapi perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Tanpa perencanaan fiskal yang matang, kebijakan yang pada awalnya populer bisa menjadi tidak berkelanjutan.

Untuk mengatasi kerentanan tersebut, masyarakat berharap agar program seragam gratis dilembagakan secara permanen melalui regulasi daerah, misalnya dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Dengan adanya dasar hukum yang kuat, program ini tidak bergantung pada preferensi politik kepala daerah semata, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pendidikan daerah yang mengikat dan wajib dijalankan oleh siapa pun pemimpin yang berkuasa. Selain itu, pelembagaan ini juga akan meningkatkan legitimasi program di mata publik, sekaligus memberikan kepastian kepada orang tua bahwa anak-anak mereka akan terus mendapatkan bantuan seragam di setiap tahun ajaran baru. Dengan demikian, keberlanjutan politik dan anggaran menjadi aspek kunci agar program seragam gratis tidak hanya menjadi kebijakan populis jangka pendek, tetapi juga instrumen nyata dalam membangun kesetaraan akses pendidikan di Kota Makassar.

#### **4.7.6 Harapan terhadap integrasi dengan bantuan pendidikan lainnya**

Sebagian besar responden menekankan bahwa seragam hanyalah salah satu kebutuhan dasar dalam menunjang pendidikan anak, sehingga program ini dinilai belum cukup untuk benar-benar mengurangi beban biaya pendidikan keluarga. Agar dampaknya lebih signifikan, masyarakat berharap kebijakan seragam gratis dapat diintegrasikan dengan bentuk bantuan lain yang juga esensial, seperti penyediaan alat tulis, buku paket, dan subsidi transportasi. Integrasi ini dianggap penting karena orang tua tetap harus mengeluarkan biaya besar di luar seragam, sementara bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya tambahan tersebut sering kali menjadi faktor penghambat keberlanjutan pendidikan anak. Dengan adanya dukungan yang lebih komprehensif, kebijakan pemerintah tidak hanya menyentuh aspek simbolis berupa seragam, tetapi juga menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan sehari-hari.

Lebih jauh, harapan integrasi program ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kualitas, bukan hanya kuantitas. Dalam literatur kebijakan publik, hal ini sejalan dengan konsep

*comprehensive policy approach*, yaitu pendekatan kebijakan yang tidak parsial, melainkan menghubungkan berbagai aspek kebutuhan agar hasilnya lebih optimal. Jika seragam gratis dapat dikombinasikan dengan bantuan lain, maka kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan partisipasi sekolah, mengurangi angka putus sekolah, serta memperkuat motivasi belajar siswa. Dengan demikian, program seragam gratis akan memiliki nilai strategis yang lebih tinggi karena tidak hanya meringankan beban biaya, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di Kota Makassar secara menyeluruh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, Program Seragam Gratis bagi Siswa SD dan SMP di Kota Makassar dapat dikatakan layak diterapkan dengan beberapa catatan. Secara sosial, kebijakan ini telah memberikan dampak positif, terutama dalam mengurangi beban ekonomi orang tua dan menciptakan kesetaraan sosial di lingkungan pendidikan. Program ini juga memperlihatkan keberhasilan dalam mengalihkan sebagian dana publik untuk kepentingan pendidikan, yang sesuai dengan prinsip kebijakan redistributif.

Secara ekonomi, alokasi anggaran sebesar Rp11–12 miliar untuk sekitar 33.000 siswa menunjukkan efisiensi yang baik, meskipun bergantung pada mekanisme efisiensi anggaran, yang rentan terhadap perubahan fiskal di masa depan. Program ini dapat diterima secara luas oleh masyarakat, meskipun terdapat beberapa kendala teknis, terutama dalam hal distribusi seragam yang terlambat dan kualitas yang tidak selalu memenuhi standar yang diharapkan. Selain itu, masih ada perbedaan persepsi terkait jumlah dan jenis seragam yang perlu disediakan, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan riil masyarakat.

Secara regulatif, program ini sudah dilandasi oleh Peraturan Walikota yang sah dan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, namun di lapangan, tantangan koordinasi antar lembaga dan resistensi dari pihak sekolah menunjukkan adanya gap dalam implementasi. Keberlanjutan kebijakan ini juga masih bergantung pada faktor fiskal dan dukungan politik yang perlu diperkuat agar program ini tidak menjadi proyek jangka pendek.

#### **5.1 Saran**

1. Peningkatan Efisiensi Distribusi: Mengingat keterlambatan distribusi yang terjadi, perlu ada perbaikan dalam mekanisme pengadaan dan distribusi seragam. Pemerintah Kota Makassar perlu mempercepat proses administrasi dan koordinasi antar instansi untuk memastikan seragam tersedia tepat waktu sebelum tahun ajaran dimulai. Penguatan kapasitas

UMKM sebagai penyedia juga harus diperhatikan agar mereka lebih siap dalam memenuhi permintaan dalam waktu singkat.

2. Peningkatan Kualitas Seragam: Pemerintah perlu memperkuat pengawasan kualitas seragam yang diberikan, termasuk pemilihan bahan yang lebih tahan lama dan sesuai standar. Penetapan mekanisme kontrol mutu yang lebih ketat terhadap penyedia akan membantu mengurangi keluhan terkait kualitas seragam yang tidak sesuai harapan.
3. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga: Untuk mengatasi masalah koordinasi antar lembaga, perlu ada pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang memiliki garis komando tunggal untuk menangani pengadaan dan distribusi seragam. Hal ini akan mempercepat proses dan memastikan ketepatan waktu serta kualitas seragam yang disediakan.
4. Pelembagaan Program dalam Peraturan Daerah: Agar program seragam gratis dapat berkelanjutan, disarankan untuk mengintegrasikan kebijakan ini dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), sehingga program ini tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan politik dan dapat terus berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
5. Penambahan Jumlah dan Jenis Seragam: Program seragam gratis sebaiknya memperluas cakupan jumlah dan jenis seragam yang diberikan. Orang tua menginginkan seragam olahraga, pramuka, dan batik sekolah, yang saat ini belum tercakup. Penambahan ini akan meningkatkan komprehensivitas kebijakan dan lebih meringankan beban orang tua.
6. Integrasi dengan Program Bantuan Pendidikan Lainnya: Untuk meningkatkan dampak kebijakan ini, sebaiknya program seragam gratis diintegrasikan dengan bantuan pendidikan lainnya, seperti penyediaan alat tulis, buku paket, atau subsidi transportasi. Dengan demikian, bantuan yang diberikan akan lebih komprehensif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.

Dengan perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, Program Seragam Gratis di Kota Makassar dapat semakin efektif dan berkelanjutan, memberikan dampak positif dalam pemerataan pendidikan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amartya, S., & Amartya, S. (2009). *The idea of justice*. Penguin Books London.
- Anderson, J. E. (1975). *Public Policy-Making [By] James E. Anderson*. Praeger.
- Becker, G. (1964). Human Capital, 1964]: Human Capital-A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Edification. *New York et Al*.
- Berdame, N. R. (2024). Kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. *Lex Privatum*, 13(5).
- Birkland, T. A. (2019). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making*. Routledge.
- Dye, T. R. (2013). Understanding public policy. In *(No Title)*. Pearson Publisher.
- Frankfurt, H. G. (1978). The problem of action. *American Philosophical Quarterly*, 15(2), 157–162.
- Frey, F. W. (1985). The problem of actor designation in political analysis. *Comparative Politics*, 17(2), 127–152.
- Friedrich, C. J. (1940a). Belief in the Common Man. *The American Scholar*, 9(3), 350–360.
- Friedrich, C. J. (1940b). Greek Political Heritage and Totalitarianism<sup>1</sup>. *The Review of Politics*, 2(2), 218–225.
- Hanf, K., & O'Toole Jr, L. J. (1992). Revisiting old friends: networks, implementation structures and the management of inter-organizational relations. *European Journal of Political Research*, 21(1-2), 163–180.
- Herlina, H., Nujum, S., & Labasse, I. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Pendapatan dan Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Terhadap Jumlah Pekerja Anak di Kota Makassar. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), 920–929.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and in practice*. Sage.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance*.
- Huffer, L., Ogden, S., Patton, P., & Sawicki, J. (2018). *Foucauldian Spaces: Round Table Discussion with Lynne Huffer, Steven Ogden, Paul Patton, and Jana Sawicki*.

- Jones, C. O. (1984). An introduction to the study of public policy. *(No Title)*.
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public policy: A new introduction*. Bloomsbury Publishing.
- Lasswell, H. D., & Lerner, D. (1951). The policy orientation. *Communication Researchers and Policy-Making*, 85–102.
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
- Patarai, M. I. (2020). *Kebijakan publik daerah: Posisi dan dimensinya dalam perspektif desentralisasi kebijakan* (Vol. 1). De La Macca.
- Rawls, J. (2001). Justice as fairness: A restatement. *Erin Kelly/Harvard University*.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1), 193–204.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Brilliant.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy analysis: Concepts and practice*. Routledge.

## Lampiran CV Ketua dan Anggota Peneliti

### 1. Ketua Peneliti



#### I.1. DATA PERSONAL

Nama : Ir. Armin Darmawan, ST., MT., Ph.D, IPM  
Tempat, tanggal lahir : Watampone, 20 Februari 1982  
Alamat : Perum Dosen Unhas Tamalanrea, Jalan Al Ikhlas  
II No.3 Kel. Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota MAKASSAR 90245  
Pekerjaan : Dosen Teknik Industri Universitas Hasanuddin  
Jabatan : Gugus Penjaminan Mutu Prodi S2 Teknik Industri  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala / Associate Professor  
No. telepon : 085399819763  
Alamat email : [darmawanarmin@gmail.com](mailto:darmawanarmin@gmail.com) ;  
[armin.d@unhas.ac.id](mailto:armin.d@unhas.ac.id)

#### I.2. PENDIDIKAN FORMAL

Diisi dengan informasi tentang PENDIDIKAN FORMAL yang telah diselesaikan, mulai dari level D3, D4, S1, S2, hingga S3

S1 : (ST), Jurusan Mesin Sub Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Indonesia (2000-2005).

Profesi : (Ir), Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Indonesia (2018).

Link akses ijazah dan transkrip:

S2 : (M.Sc), Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering, Universitas Indonesia, Indonesia (2009-2011).

S3 : (Ph.D), Department of Industrial Engineering and Engineering Management, College of Engineering, National Tsing Hua University, Taiwan (2020 – 2023).

### I.3. PENGALAMAN BERORGANISASI

No	Nama organisasi atau Kepanitiaan	Posisi	Periode/ Tahun
1	Himpunan Mahasiswa Mesin FTUH	Anggota	2000-2005
2	Himpunan Mahasiswa Islam Komiasariat FTUH	Ketua Bidang Kemahasiswaan	2001-2002
3	Perhimpunan Mahasiswa Bone – Unhas Latenritatta	Ketua Departemen Dana dan Usaha	2002 - 2003
4	Laboratorium Mekanika Fluida	Ketua	2004 - 2005
5	Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota Nasional	2013-2016
6	Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota Nasional	2016-2018
7	Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Teknik Industri Indonesia (BKSTI)	Anggota Nasional	2020 – 2024
8	Prodi Teknik Industri UNHAS	Sekretaris Bidang Kemahasiswaan	2015 – 2017
9	Prodi Teknik Industri UNHAS	Sekretaris Program Kerjasama Prodi Teknik Industri dan PT Vale	2014 - 2017
10	UNIDO-PBB kerjasama CRECPI-ITB	Associate/National Expert	2015 - 2018
11	LPDP Taiwan	Lurah/Ketua	2022 – 2023
12	Perhimpunan Pelajar Indonesia Hsinchu Taiwan <a href="https://ppihsinchu.org/kepengurusan-2021/">https://ppihsinchu.org/kepengurusan-2021/</a>	Wakil Ketua	2020 - 2021
13	Konferensi International ICREST 2024 Universitas Hasanuddin	Ketua Panitia	2024
14	Gugus Penjaminan Mutu Prodi S2 Teknik Industri Unhas	Ketua	2024
15	Gugus Penjaminan Mutu Prodi S2 Teknik Industri Unhas	Ketua	2025

16	Bada Kejuruan Teknik Industri (BKTI) PII		2025
----	--	--	------

#### I.4. PENGHARGAAN/PRESTASI

No	Nama Penghargaan/Prestasi	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Beasiswa S2	Beasiswa Daerah	2009-2010
2.	Beasiswa S3	Beasiswa LPDP	2020 - 2023
3.	Best Employee of BOM Dept,	Astra International Group – PT.FIF	2008
4.	Best Ph.D Student of IEEM Dept. NTHU	IEEM Dept. National Tsing Hua University	2023
5.	The Phi Tau Phi Award Honorary Society <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Phi_Tau_Phi">https://en.wikipedia.org/wiki/Phi_Tau_Phi</a>	The Phi Tau Phi Scholastic Honor Society of the Republic of China <a href="http://www.phitauphi.org.tw/">http://www.phitauphi.org.t w/</a>	2024
6.	Sertifikat Penghargaan Apresiasi LPDP sebagai Lurah LPDP Taiwan	LPDP Republik Indonesia	2024
7.	Certificate of Appreciation as Lecturer for the course of Quality Control and Assurance (International Class)	Faculty of Engineering Universitas Hasanuddin	2025

#### I.5. RIWAYAT SEBAGAI PESERTA KURSUS, WORKSHOP, PELATIHAN, BIMTEK, SOSIALISASI KETEKNIKAN / MANAJEMEN

No	Nama Workshop/Pelatihan/Bimtek	Pelaksana	Durasi Kegiatan	Tahun
1	Pelatihan PEKERTI	LKPP - Unhas	2 Minggu	2013
2	Prajabatan CPNS Gol III	Kemdikbud	1 Bulan	2013
3	Pelatihan Aplied Aproach	LKPP - Unhas	2 Minggu	2014
4	The 2014 International Summer School on Human Science.	The Human Science International Course, Kyushu	1 Minggu	2014

		University, Fukuoka, Japan		
5	Training Resource Efficient and Cleaner Production Diadakan oleh Center for Resource Efficient and Cleaner Production Indonesia (CRECPI)-ITB, Kementerian KLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan UNIDO.	UNIDO-PBB CRECPI ITB	1 Bulan	2015
6	Training Resource Efficient and Cleaner Production Diadakan oleh Center for Resource Efficient and Cleaner Production Indonesia (CRECPI)-ITB, Kementerian KLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan UNIDO.	UNIDO-PBB CRECPI ITB	1 Bulan	2016
7	Training Resource Efficient and Cleaner Production Diadakan oleh Center for Resource Efficient and Cleaner Production Indonesia (CRECPI)-ITB, Kementerian KLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan UNIDO.	UNIDO-PBB CRECPI ITB	1 Bulan	2017
8	Pelatihan AK3 Umum	P2K3 Unhas	14 hari	2017
9	Pelatihan Asesor Kompetensi	BNSP	5 hari	2015
10	Pelatihan Asesor Kompetensi	BNSP	5 hari	2018
11	Capstone Design and Best Practice (BKSTI)	BKSTI	1 hari	2024
12	Sosialisasi dan Lokakarya BKSTI	BKSTI	3 hari	2024

### I.6. SERTIFIKAT KOMPETENSI

No	Nama Sertifikat Kompetensi	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Dosen Profesional	Kemendikti	2015
2	Ahli K3 Umum	Kemenakertrans RI	2017
3	Assessor Perencanaan dan Pengendalian Produksi	BNSP	2015
4	Assessor Perencanaan dan Pengendalian Produksi	BNSP	2018

### III. RIWAYAT PEKERJAAN & PENANGANAN KERJA KEINSINYURAN

No	Nama Proyek	Posisi	Pemberi Pekerjaan	Tahun
1.	Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Program Inisiasi	Associate/National Expert	UNIDO-PBB CRECPI-ITB	2015
2.	Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Program Deployment	Associate/National Expert	UNIDO-PBB CRECPI-ITB	2016
3.	Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Program Pertama <b>PT Wahyu Pradana Binamulia</b>	Associate/National Expert	UNIDO-PBB CRECPI-ITB	2017
4.	Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Program Pertama <b>PT Sermani Steel</b>	Associate/National Expert	UNIDO-PBB CRECPI-ITB	2017

5.	Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Program Pertama <b>PT Bantimurung Indah</b>	Associate/National Expert	UNIDO-PBB CRECPI-ITB	2017
6.	Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Program Kedua <b>PT Wahyu Pradana Binamulia</b>	Associate/National Expert	UNIDO-PBB CRECPI-ITB	2018
7.	Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Program Kedua <b>PT Sermani Steel</b>	Associate/National Expert	UNIDO-PBB CRECPI-ITB	2018
8.	Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Program Kedua <b>PT Bantimurung Indah</b>	Associate/National Expert	UNIDO-PBB CRECPI-ITB	2018
9.	Studi Kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Mini (PLTMH) Bonehau I	Project Manager	PT. Bonehau Energi Mandiri	2017 - 2018

**PENELITIAN & KEGIATAN PENGABDIAN:**

No	Judul penelitian	Posisi	Penyandang Dana	Tahun
1	Evaluasi Tingkat Kualitas Layanan Industri Moda Transportasi Publik Dengan Integrasi Pendekatan Servqual Dan Ipa Diagram	Ketua Peneliti	Skema Penelitian Dosen Pemula – LPPM Unhas	2018

2	Design and Development of Stage-Independent Multiple Sampling Plans for Variables Inspection using Process Capability Indices	Anggota Peneliti	National Tsing Hua University Taiwan LPDP Indonesia	2022 - 2023
3	Stage-independent multiple sampling plan by variables inspection for lot determination based on the process capability index Cpk	Anggota Peneliti	National Tsing Hua University Taiwan LPDP Indonesia	2022 - 2023
4	A modified sampling scheme for lot sentencing based on the third-generation capability index	Anggota Peneliti	National Tsing Hua University Taiwan LPDP Indonesia	2022 - 2023
5	Developing a stage-independent multiple sampling plan with loss-based capability index for lot disposition	Anggota Peneliti	National Tsing Hua University Taiwan LPDP Indonesia	2022 - 2023
6	Designing an enhanced acceptance sampling strategy with the process loss index	Ketua Peneliti	LPDP Indonesia NTHU Taiwan	2024
7	A Flexible Resubmitted Variable Sampling Plan for Variables Lot Determination Using the Process Loss Index	Ketua Peneliti		2025

**MEMBIMBING dan MENGUJI TUGAS AKHIR, THESIS atau DISERTASI**

No	Judul TA/Thesis/Disertasi	Posisi	Nama Mahasiswa	Tahun
1	Asesmen kompetensi skema Ahli Perencanaan dan Pengendalian Produksi	Asesor Kompetensi	Batch-1 LSP ATIM	2017

2	Pengembangan Sistem Rekomendasi Dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen Menemukan Produk Skincare Alternatif Dengan Pendekatan Data Mining	Pembimbing Utama	Supriadi	2024
3	Analisis Pengaruh Perceived Attractiveness dan Perceived Value For Money Terhadap Revisit Intention Dengan Customer Satisfaction Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Objek Wisata Londa) / TA Hellavani	Pembimbing Utama	Hellavani	2024
4	Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan Lokasi Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus: Café Di Kota Palu) / TA Clara Florencia Ubas B	Pembimbing Utama	Clara	2024
5	Upaya Meminimasi Defect Produk Bata Ringan Di PT. Hebel Cipta Sarana Bumi Dengan Penerapan SIX SIGMA dan Pendekatan DMAIC (Studi Kasus: PT Hebel Cipta Sarana Bumi Gowa).” / Seminar Hasil Theresya Saranga_D071201018	Penguji	Theresya	2024

6	Implementasi Machine Learning untuk Prediksi Inflasi dan PDRB Sulawesi Selatan / Ujian Sarjana _Jacqlien Patriacia Maweru Runtu_D071201038	Penguji	Supriadi	2024
7	Optimalisasi Preventive Maintenance Mesin Ball Mill Menggunakan Metode Modularity Design (Studi Kasus PT. Bumi Sarana Beton /Ujian Sarjana Rizki Ananda_D071201037	Penguji	Ananda	2024
8	Pemodelan System Dynamic Pada Pengelolaan Berkelanjutan Limbah Padat Menjadi Bahan Bakar Jumptan Padat_An. Muhammad Imam_D072231013 (Sk Dosen Penguji Seminar Usul )	Penguji	Muhammad Imam	2024
9	Pengembangan Sistem Rekomendasi Dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen Menemukan Produk Skincare Alternatif Dengan Pendekatan Data Mining / Seminar Hasil Supriadi_D071201040	Penguji	Supriadi	2024
10	Model Optimasi Lokasi Fasilitas Terpadu Pada Rute Distribusi Bantuan	Penguji	Muhardin	2024

	Kemanusiaan Dalam Kesiapsiagaan Bencana Banjir (Studi Kasus Kec. Sampara Kab. Konawe) An. Muhardin Sahabuddin/D072231002			
11	Implementasi text mining untuk perbaikan kualitas layanan berdasarkan ulasan end user aplikasi myim3_AN. HELFRIDA HANDAYANI_D072221009 (SK DOSEN PENGUJI SEMINAR USUL)	Penguji	Helfrida	2024
12	Implementasi Multiple Linear Regression (MLR) dan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) untuk Memprediksi Perilaku Pelanggan Pada Generasi Z ( Studi Kasus: PT Yotta Berkah Mulia / ujian sarjana astrina_D071201021	Penguji	Astrina	2024
13	Implementasi Machine Learning untuk Prediksi Inflasi dan PDRB Sulawesi Selatan / Seminar Hasil_Jacqlien Patriacia Maweru Runtu_D071201038	Penguji	Jacquelin	2024
14	Evaluasi Kinerja Proyek Feed End Shell Dryer #3 Replacement Proses Plant	Penguji	Rara Pasolang	2024

	PT Vale Indonesia Tbk Menggunakan Metode Earned Value Management (EVM)/ Ujian Sarjana Rara Pasolang			
15	Analisis Proses Produksi Kacang Mete Untuk Meminimasi Lead Time Dengan Menggunakan Pendekatan Lean Manufacturing” Studi Kasus Pada : PT. Bunly Abadi Bersama / Ujian Sarjana Zhildjihhan Al Gifari	Penguji	Zhildjihhan	2024
16	Analisis Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Sebagai Intervening Variable (Studi Kasus : J & T express Subagent Kaliorang) / Seminar Heriansah_D071201015	Penguji	Heriansyah	2024
17	Analisis Kelayakan Aspek Biaya Teman Bus Rute Kampus Tamalanrea – Kampus Teknik Unhas Gowa / Seminar Amirah Ayu Arrasyidah_D071201027	Penguji	Amirah	2024
18	Analisa Kinerja Penjadwalan Produksi Pada	Penguji	Muhammad Taufiq	2024

	<p>Berbagai Level Permintaan Dengan Metode Campbell Dudek Smith (Cds) Dan Ho Dan Chang (Hc) Pada Toyota Production System_Muhammad Taufiq Muharrar</p> <p>My/D072211010(Sk Dosen Penguji Seminar Usul Prodi S2 Teknik Industri)</p>			
19	<p>Penyusunan Strategi Mitigasi Risiko Yang Efektif Dalam Menurunkan "Risk Score" (Studi Kasus: Pt. Japfa Comfeed)_An.</p> <p>Ahmad Alfani_D072231012 (Sk Dosen Pembimbing Tesis)</p>	Pembimbing	Ahmad Alfani	2024

#### IV. PENGALAMAN MENGAJAR KEINSINYURAN DAN/MANAJEMEN

No	Nama Matakuliah	Posisi	Tempat Mengajar	Lama Pengampuan
1	Pengantar Teknik Industri	Dosen	Prodi TI Unhas	5 tahun
2	Statistik Industri	Koordinator	Prodi TI Unhas	7 tahun
3	Teori Probabilitas	Dosen	Prodi TI Unhas	5 tahun
4	Simulasi Sistem Industri	Dosen	Prodi TI Unhas	4 tahun
5	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Dosen	Prodi TI Unhas	4 tahun
6	Pengendalian dan Penjaminan Mutu	Dosen	Prodi TI Unhas	6 tahun
7	Praktikum Perancangan Teknik Industri 1	Dosen	Prodi TI Unhas	5 tahun
8	Matematika Optimasi	Dosen	Prodi TI Unhas	1 tahun

9	Rekayasa dan Manajemen Kualitas	Dosen	Prodi TI Unhas	1 tahun
10	Data Analitika	Koordinator	Prodi TI Unhas	1 tahun
11	Data Analitik	Koordinator	Prodi TI Unhas	1 tahun

#### V.1. KARYA TULIS DIBIDANG KEINSINYURAN YANG DIPUBLIKASIKAN

No	Judul Karya Tulis	Tempat publikasi	Level Publikasi	Tahun
1	Model Manajemen Risiko Operasional Pada Perusahaan Jasa	Academia Publication	Nasional	2025
2	Fundamental Pengendalian dan Penjaminan Mutu: Teori dan Praktik	GetPress	Nasional	2025
3	Metode Analisis Perencanaan	GetPress	Nasional	2025
4	Designing an Enhanced Acceptance Sampling Strategy with the Process Loss Index	Inderscience EIJIE	International	2025
5	Evaluating the quality of pole concrete production through the integration of Six Sigma and Kaizen <a href="https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jiss/article/view/27281">https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jiss/article/view/27281</a>	JISS Untirta	Nasional	2024
6	Developing variables two-plan sampling scheme with consideration of process loss for lot sentencing  <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08982112.2024.2381012">https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08982112.2024.2381012</a>	Taylor Francis	Internasional	2024
7	Developing an interactive graphical user interface for the flexible acceptance sampling plan	UNUSIDA	Nasional	2024

	<a href="https://journal.unusida.ac.id/index.php/jrt/article/view/1170">https://journal.unusida.ac.id/index.php/jrt/article/view/1170</a>			
8	Developing a stage-independent multiple sampling plan with loss-based capability index for lot disposition  <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01605682.2024.2363264">https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01605682.2024.2363264</a>	Taylor Francis	International	2024
9	A double sampling plan for truncated life tests under two-parameter Lindley distribution  <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-024-05955-0">https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-024-05955-0</a>	Springer	International	2024
10	Assessing high-quality process performance using the quality-yield index: An innovative methodology  <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/qre.3576">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/qre.3576</a>	Wiley & Sons	International	2024
11	Stage-independent multiple sampling plan by variables inspection for lot determination based on the process capability index $C_{pk}$  <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207543.2022.2078745">https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207543.2022.2078745</a>	Taylor Francis	Internasional	2023
12	A modified sampling scheme for lot sentencing based on the third-generation capability index	Springer	Internasional	2023

	<a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-023-05328-z">https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-023-05328-z</a>			
13	A fuzzy SERVQUAL based method for measuring quality service in the telecommunication industry <a href="https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/2543/1/060007/2829332/A-fuzzy-SERVQUAL-based-method-for-measuring">https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/2543/1/060007/2829332/A-fuzzy-SERVQUAL-based-method-for-measuring</a>	AIP Proceeding	International	2022
14	Assessing validity and reliability of an instrument for measuring student digital leadership: Example from Indonesia  <a href="https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9990863">https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9990863</a>	IEEE Explore	Internasional	2022
15	Improving Service Quality Of Delivery Services Based On Heterogeneous Customer Behavior In A Developing Country: A Context During Covid-19  <a href="https://jurnal.poltekapp.ac.id/index.php/JMIL/article/view/968">https://jurnal.poltekapp.ac.id/index.php/JMIL/article/view/968</a>	JMIL Politeknik APP	Nasional	2022
16	Selection process for an automated storage system: a unison framework approach  <a href="https://sajie.journals.ac.za/pub/article/view/2509">https://sajie.journals.ac.za/pub/article/view/2509</a>	SAJIE	Internasional	2022
17	Future application of multisensory mixed reality in the human cyber— Physical system	SAJIE	Internasional	2021

	<a href="https://sajie.journals.ac.za/pub/article/view/2551">https://sajie.journals.ac.za/pub/article/view/2551</a>			
18	Kajian Kualitas Layanan Jasa Transportasi Logistik Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Dengan Pendekatan Metode Zone Of Tolerance (ZOT)  <a href="https://journal.untar.ac.id/index.php/industri/article/view/8705">https://journal.untar.ac.id/index.php/industri/article/view/8705</a>	Jurnal Teknik Industri Universitas Tarumanegara	Nasional	2021
19	Development Trend of Human-Cyber Physical System in Manufacturing: Mixed Reality Patent Analytics  <a href="https://ebooks.iospress.nl/volumearticle/57806">https://ebooks.iospress.nl/volumearticle/57806</a>	IOS Press	Internasional	2021
20	Analysis on Product Quality of Semi Refined Carrageenan using Six Sigma and Cost of Poor Quality  <a href="https://industria.ub.ac.id/index.php/industri/article/view/463">https://industria.ub.ac.id/index.php/industri/article/view/463</a>	Industria Universitas Brawijaya	Nasional	2020
21	Evaluation on moisture content of Eucheuma cottonii seaweed variety using statistical quality control approach  <a href="https://industria.ub.ac.id/index.php/industri/article/view/470">https://industria.ub.ac.id/index.php/industri/article/view/470</a>	Industria Universitas Brawijaya	Nasional	2020

22	Reducing variability in process and the risk of product defects: A case study in SME's  <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/885/1/012055/meta">https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/885/1/012055/meta</a>	IOP Science	Internasional	2020
23	Potential of Work Related Musculoskeletal Disorder in Traditional Salt Farmers  <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/875/1/012061/meta">https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/875/1/012061/meta</a>	IOP Science	Internasional	2020
24	Six Sigma Implementation in quality evaluation of raw material: a case study  <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/875/1/012065/meta">https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/875/1/012065/meta</a>	IOP Science	Internasional	2020
25	The supply chain risk analysis using House of Risk method: seaweed commodity in Jeneponto case study  <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/343/1/012011/meta">https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/343/1/012011/meta</a>	IOP Science	Internasional	2019
26	Green inventory controlling analysis of coal using the lot sizing technique: Lesson learned form nickel mining industry  <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/343/1/012005/meta">https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/343/1/012005/meta</a>	IOP Science	Internasional	2019
27	The Empirical Analysis of the Quality Level of Tourim Industry Services in Toraja: Ke'te Kesu	JITODE Universitas Brawijaya	Nasional	2019

	<a href="https://jitode.ub.ac.id/index.php/jitode/article/view/307">https://jitode.ub.ac.id/index.php/jitode/article/view/307</a>			
28	Evaluasi Tingkat Kualitas Layanan Industri Moda Transportasi Publik dengan Integrasi Pendekatan SERVQUAL dan IPA Diagram <a href="http://journal.uad.ac.id/index.php/Spektrum/article/view/11540">http://journal.uad.ac.id/index.php/Spektrum/article/view/11540</a>	Jurnal Spektrum Industri Universitas Ahmad Dahlan	Nasional	2018
29	Penentuan Atribut Prioritas dalam Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Publik <a href="http://cot.unhas.ac.id/seminar/sinastek2018/wp-content/uploads/2019/01/TM1804-Armin-Darmawan-OK-1.pdf">http://cot.unhas.ac.id/seminar/sinastek2018/wp-content/uploads/2019/01/TM1804-Armin-Darmawan-OK-1.pdf</a>	Unhas	Nasional	2018
30	Evaluasi kualitas layanan terhadap operator telekomunikasi: tinjauan perspektif pelanggan <a href="https://josi.ft.unand.ac.id/index.php/josi/article/view/194">https://josi.ft.unand.ac.id/index.php/josi/article/view/194</a>	JOSI Universitas Andalas	Nasional	2017
31	Analisis perawatan untuk mendeteksi risiko kegagalan komponen pada excavator 390D <a href="https://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/article/view/2139">https://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/article/view/2139</a>	JITI UMS	Nasional	2017
32	Empirical Quality Control Analysis on Manufacture Industry Process: A Case Study in Development Country <a href="https://cot.unhas.ac.id/journals/index.php/jpe/article/view/22">https://cot.unhas.ac.id/journals/index.php/jpe/article/view/22</a>	JPE Unhas	Nasional	2016

**V.2. MAKALAH/TULISAN YANG DISAJIKAN DALAM PERTEMUAN /  
SEMINAR TEKNIS KEINSINYURAN**

<b>No</b>	<b>Judul Karya Tulis</b>	<b>Nama Kegiatan Keinsinyuran</b>	<b>Level Kegiatan</b>	<b>Tahun</b>
1	Penentuan Atribut Prioritas Dalam Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Publik	Seminar Ilmiah Nasional Sains Dan Teknologi Ke-4 (2018),	Nasional	2018
2	Six Sigma Implementation in quality evaluation of raw material: a case study	The 3rd EPI International Conference On Science And Engineering 2019 (EICSE2019) 24-25 September 2019, South Sulawesi, Indonesia	International	2019
3	Reducing variability in process and the risk of product defects: A case study in SME's	1st International Scientific Meeting on Engineering and its Vocational Education (ISMEVD 2019) 31 October 2019, Makassar, Indonesia	International	2019
4	Development Trend of Human-Cyber Physical System in Manufacturing: Mixed Reality Patent Analytics	Advances in Transdisciplinary Engineering	International	2021
5	Development of Selection System for Automatic Storage System based on a UNISON Framework Approach	Decision Analysis Symposium 23rd 2021	International	2021

6	A Modified Sampling Scheme for Lot Sentencing Based on the Third-Generation Capability Index	The 10th Asia Pacific International Symposium on Advanced Reliability and Maintenance Modeling (APARM 2022)	International	2022
7	Assessing validity and reliability of an instrument for measuring student digital leadership: Example from Indonesia	2022 8th International Conference on Education and Technology (ICET)	International	2022
8	A Novel Approach for Evaluating High-Quality Process Performance Based on the Quality-Yield Index	2nd ISSAT International Conference on Data Science in Business, Finance and Industry in Dong A University Vietnam	International	2023
9	A Flexible Resubmitted Variable Sampling Plan for Variables Lot Determination Using the Process Loss Index	2 <sup>nd</sup> ICREST 2024 International Conference on Research in Engineering Science and Technology in Hasanuddin University, Indonesia	International	2024

**V.3. KEIKUTSERTAAN DALAM PERTEMUAN / SEMINAR (ONLINE) /  
WEBINAR / TEKNIS**

No	Judul Kegiatan Keinsinyuran	Penyelenggara	Level Kegiatan	Tahun
1	Resource Efficient & Cleaner Production (RECP) Program I	UNIDO-PBB CRECPI-ITB	International	2017
2	Resource Efficient & Cleaner Production (RECP) Program II	UNIDO-PBB CRECPI-ITB	International	2018
3	Meeting Evaluasi Tahap Awal Survey Kelayakan PLTM Bonehau I	PT Energi Bonehau Mandiri	National	2018
4	SEMINAR ILMIAH NASIONAL SAINS DAN TEKNOLOGI KE-4 4 (2018),	Fakultas Teknik Unhas	National	2018
5	The 3rd EPI International Conference on Science and Engineering 2019 (EICSE2019) 24-25 September 2019, South Sulawesi, Indonesia	Fakultas Teknik Unhas	International	2019
6	1st International Scientific Meeting on Engineering and its Vocational Education (ISMEVD 2019) 31 October 2019, Makassar, Indonesia	Politeknik ATI Makassar	International	2019
7	The 28th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering. The University of Bath. Bath, UK, July 5-9, 2021 Advances in Transdisciplinary Engineering	The University of Bath, UK (Inggris)	International	2021
8	Decision Analysis Symposium 23rd 2021	National Taipei University of	International	2021

		Technology, Taipei, Taiwan		
9	The 10th Asia Pacific International Symposium on Advanced Reliability and Maintenance Modeling (APARM 2022)	National Tsing Hua University & National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan	International	2022
10	2022 8th International Conference on Education and Technology (ICET)	Universitas Negeri Malang	International	2022
11	2nd ISSAT International Conference on Data Science in Business, Finance, and Industry in Dong-A University Vietnam	Da Nang University Vietnam	International	2023
12	2nd ICREST 2024 International Conference on Research in Engineering Science and Technology in Hasanuddin University, Indonesia	Fakultas Teknik Unhas	International	2024

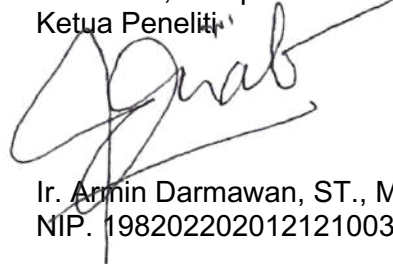
#### V.4. KARYA TEMUAN/INOVASI/PATEN DAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI BARU

No	Judul Inovasi/Temuan	Tahun
1	Tampilan Antar Muka Aplikasi Interaktif Model Inspeksi Untuk Penentuan Kualitas Produk/Material Id Permohonan: A00202402025 (Desain Industri)	2025
2	Publikasi: Developing an interactive graphical user interface for the flexible acceptance sampling plan (Hak Cipta)	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari

ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Makassar, 6 September 2025  
Ketua Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Armin', written over the printed name and title.

Ir. Armin Darmawan, ST., MT., Ph.D, IPM  
NIP. 198202202012121003

## 2. Anggota Peneliti 1

### CURRICULUM VITAE



1	Nama Lengkap	Sulmiah, S.Pd., M.A.P.
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/No. Identitas Lainnya	19840226 201903 2 012
5	NIDN	0026028402
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Ujung Pandang, 26 Februari 1984
7	Alamat Rumah	Perum Gerhana Alauddin Blok F/24
8	Nomor Telepon/Fax.	-
9	Nomor HP.	082293953441
10	Alamat Kantor	JL. AP. Pettarani Gunungsari Baru Makassar
11	Alamat e-mail	<a href="mailto:sulmiah@unm.ac.id">sulmiah@unm.ac.id</a>

#### A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Makassar	Universitas Padjadjaran
Bidang Ilmu	Pendidikan Administrasi Perkantoran	Administrasi Publik
Tahun Masuk-Lulus	2006-2010	2010-2013
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Proses Pembelajaran Pada SMP Negeri 6 di Kota Makassar	Pengaruh Public Service Motivation (PSM) Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pelayanan

		Administrasi Perizinan (KPAP) Kota Makassar
Nama Pembimbing/Promotor	1) Dr. H.Muhammad Guntur,M.Si 2) Dr. Risma Niswaty, M.Si	1) Prof. Dr. Drs. Josy Adiwisastra 2) Dr. Drs. H. Herijanto Beki, M.Si

#### B. Pengalaman Penelitian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2020	Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengawasan Pelaksanaan Program Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Jeneponto	PNBP FIS-H UNM	21.500.000
2	2021	Implementasi Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Bone	PNBP FIS-H UNM	12.500.000
3	2022	Penguatan <i>Social Capital</i> Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kelurahan Malino Kabupaten Gowa	PNBP FIS-H UNM	11.000.000
4	2023	Strategi Pengembangan Agrowisata Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng	PNBP FIS-H UNM	15.000.000
5	2023	Pengaruh Budaya Organisasi an inovasi pelayanan terhadap efektifitas Pelayanan Publik (studi Kasus Pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Maros)	PNBP FIS-H UNM	15.000.000
6	2024	Online Single Submission: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pint Kabupaten Luwu Timur	PNBP FIS-H UNM	15.000.000
7	2025	Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Inovasi Berkelanjutan dalam Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Makassar	PNBP FIS-H UNM	12.500.000
8	2025	Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Peningkatan PAD di Kabupaten Bulukumba	PNBP Pascasarjana UNM	20.000.000

### C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2020	PKM Pengentasan Kemiskinan Melalui SocialPreneur Bagi Kelompok PKK di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto	PNBP FIS-H UNM	10.000.000
2	2021	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kabupaten Barru	PNBP FIS-H UNM	10.000.000
3	2022	Pkm Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru Sma Negeri 15 Bone	PNBP FIS-H UNM	10.000.000
4	2023	PKM Pengelola Sampah Plastik Menjadi Bata Ramah Lingkungan	PNBP FIS-H UNM	10.000.000
5	2023	Pelatihan Excelent Service Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar	PNBP FIS-H UNM	10.000.000
6	2024	Pembinaan Wawasan Pariwisata Berkelanjutan : Upaya Mewujudkan Desa Wisata di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa	PNBP FIS-H UNM	13.000.000
7	2025	Peningkatan Sistim Administrasi dalam Pengembangan Bisnis, Penjualan On-line, dan Off-line pada Rumah Batik Bunga Mawar di Kabupaten Bulukumba	PNBP Pascasarjana UNM	15.000.000
8	2025	Penguatan Kapasitas Kelompok Pemuda Bahari dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Community-Based Tourism di Desa Nisombalia Kabupaten Maros	PNBP FIS-H	13.000.000

### D. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Pelayanan Penerbitan Stnk Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal SatuAtap (Samsat) Kabupaten Bone	Jurnal Ilmu Administrasi:Media Pengembangan Ilmu dan Praktek	Vol 2 /No.14/ 2017

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
2	Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan Di Indonesia Timur: Dampak terhadap Tata Kelola Perkotaan	Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek	Vol 2/N0.16/2019
4	Institutional Capacity in Clean Water Management in Jeneponto Regency	Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik	Vol 2 /No. 9/2019

**E. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/  
Seminar Ilmiah**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Asia Pacific Society of Public Affairs (APSPA) INCONPO 2016	Policy Implementation Of Small Business Empowerment In Wajo Regency- Indonesia	10-11 Agustus 2016, Thammasat University, Thaprachan Campus, Bangkok, Thailand
2	Seminar Nasional Dies Natalis Ke-58 UNM	Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan Di Indonesia Timur : Dampak Terhadap Tata Kelolaerkotaan	22 Juli 2019, Makassar, Indonesia
3	International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)	PDAM Challenge to Provide Water Services Industry in the Era 4.0: Case Study of Regency Jeneponto; South Sulawesi	17-18 Oktober 2019, Surabaya, Indonesia
4	IAPA Annual Conference 2019	Strategic Human Resource Management In Clean Water Management At District Jeneponto, South Sulawesi	10-12 November 2019, Bali, Indonesia
5	3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)	The Use of State Property to Increase State Revenues: Optimize Control in Universitas Negeri Makassar	15 Oktober 2020, Makassar, Indonesia
6	3rd International	Public Service Innovation	15 Oktober 2020,

No.	Nama Pertemuan Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
	Conference on Social Sciences (ICSS 2020	in the Investment Office and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) of Makassar City	Makassar, Indonesia
7	Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	Pengentasan Kemiskinan Melalui <i>Social Preneur</i>	24 Oktober 2020, Makassar, Indonesia
8	IAPA Annual Conference 2020	Supervision Strategies for Improving Community Welfare Program in East Indonesia Area	11 November 2020, Malang, Indonesia
9	International Conference on Science and Advanced Technology (ICSAT) 2020	Government Challenges in Public Policy Supervision: Community Salt Business Program in Jeneponto Regency South Sulawesi	21 November 2020, Makassar, Indonesia

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Makassar, 6 September 2025



Sulmiah, S.Pd., M.A.P.  
NIP 1998402262019032012

### 3. Anggota Peneliti 2

#### CURRICULUM VITAE



##### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Dyan Paramitha Darmayanti, S. Pd., M. Pd
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen – Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	199505162022032016
5	NIDN	0016059503
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pangkajene, 16 Mei 1995
7	E-mail	<a href="mailto:dyanparamitha@unm.ac.id">dyanparamitha@unm.ac.id</a>
8	Nomor Telepon/HP	085241579616/ 08114441772
9	Alamat Kantor	JL. AP. Pettarani Gunungsari Baru Makassar
10	Nomor Telepon/Faks	0411 869834-860468/ Fax 868794

##### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Makassar	Universitas Negeri Makassar	Universitas Hasanuddin
Bidang Ilmu	Pendidikan Antropologi	Pendidikan IPS Kekhususan Pendidikan Antropologi	Ilmu Antropologi

Tahun Masuk-Lulus	2012-2016	2016-2018	2019-2024
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	<i>Double Burden</i> pada Perempuan Pekerja di Matahari Departement Store Mall Tanjung Bunga (GTC) Makassar.	Peran Perempuan <i>Single Parent</i> dalam Mengasuh Anak di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Suatu Kajian Antropologi Gender).	<i>Sugar Dating: Hubungan Kencan Transaksional antara Sugar Baby dan Sugar Daddy/ Sugar Mommy</i> di Kota Makassar
Nama Pembimbing/Promotor	1. St. Junaeda. S.Ag., M.Pd., MA. 2. Dr. Andi Octamaya Tenri Awaru. S.Pd., M.Pd.	1. Prof. Dr. Jumadi Sahabuddin, S.Pd., M.Si 2. Dr. H. M. Rasyid Ridha, M. Hum	1. Prof. Nurul Ilmi Idrus, M. Sc., Ph. D 2. Prof. Dr. Mahmud Tang, MA 3. Prof. Dr. Pawennari Hijang, MA

### C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1.	2022	Konflik Peran Ganda Guru Penggerak Perempuan di Kabupaten Sinjai	PNBP	Rp. 35.000.000
2.	2024	Pengaruh Sosialisasi Dan Kerja Sama Terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Hubungan Interpersonal Remaja Awal di Sulawesi Selatan	PNBP	Rp. 20.000.000

3.	2024	Perkawinan Lintas Etnis Suku Makassar dan Suku Jawa di Kota Makassar	PNBP	Rp. 35.000.000
4.	2024	Perselingkuhan Pada Ruang Digital	PNBP	Rp. 20.000.000

#### D. Pengalaman Pengabdian dalam 5 Tahun

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2022	Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Guru SMAN 15 Bone Kabupaten Bone	PNBP	Rp. 10.000.000
2.	2023	PKM Peningkatan Kepercayaan Diri Remaja Melalui Pelatihan <i>Public Speaking</i> di SMPN 33 Makassar	PNBP	Rp. 11.000.000
3.	2023	PKM Pengelolaan Sampah Plastik Menjadi Bata Ramah Lingkungan	PNBP	Rp. 11.000.000
4.	2024	PKM Sosialisasi Etika Bermedia Sosial Pada Siswa SMPN 33 Makassar	PNBP	Rp. 15.000.000

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1.	<i>Double Burden</i> pada Perempuan Pekerja di Matahari Departement Store Mall Tanjung Bunga (GTC) Makassar.	Jurnal Program Studi Pendidikan IPS Program Pascasarjana: Phinisi Integration Review	Volume 1/ Nomor 2/ 2018
2	<i>Clubbing: Life Style</i> Para Remaja di Kota Makassar	Jurnal Program Studi Pendidikan IPS Program Pascasarjana: Phinisi Integration Review	Volume 5/ Nomor 3/ 2022

3	Improving Early Childhood Emotional Intelligence Through Traditional "Balogo" Games in Kindergartens	The Asian Institute of Research	Volume 5/ Nomor 4/ 2022
4	Pengaruh Sekolah Ramah Anak Terhadap Perilaku Asosial	Social Landscape Journal	Volume 3/ Nomor 3/ 2022
5	Kegiatan Ekonomi Masyarakat Jawa di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar	Jurnal Program Studi Pendidikan IPS Program Pascasarjana: Phinisi Integration Review	Volume 6/ Nomor 1/ 2023
6	Perilaku Konsumtif Gay di Kota Makassar	Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan	Volume 1 No 2/ 2023
7	The Importance of Parental Involvement in the Education Process: An Analysis of Its Role and Impact	Celebes Journal of Elementary Education	Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023
8	Application of Child Protection Law in the Context of Formal Education: A Social Anthropology Review	Celebes Journal of Elementary Education	Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023
9	The Role of Teachers and Parents in Preventing the Influence of LGBT on Adolescents	Pinisi Journal of Social Science	Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023
10	The Integrity of State Civil Apparatus in the Regional Election Process (Case Study of Bone District)	Pinisi Journal of Social Science	Volume 1 Nomor 3 Tahun 2023

11	Alokasi Waktu Orang Tua Tunggal Perempuan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap	Alliri: Journal Of Anthropology	Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023
12	The Existence of Totammaq Tradition Celebration in Mandar Culture Mandar Community, West Sulawesi	Pinisi Journal of Social Science	Volume 2 Nomor 2 Tahun 2023
13	The Meaning of Beauty in Phenomonological Perspective Among Students of Universitas Negeri Makassar	Social Landscape Journal	Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
14	Penggunaan Aplikasi Quizziz sebagai Kuis Interaktif pada Mata Kuliah Pengantar Pendidikan di Jurusan Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Makassar	Jurnal Sains dan Teknologi	Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
15	Masa Depan Hukum Adat di Indonesia	Jurnal Sains dan Teknologi	Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
16	Beban Ganda dan Perubahan Peran Gender: Dampak pada Hubungan Keluarga dan Keseimbangan Kehidupan	Alliri: Journal Of Anthropology	Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
17	FoMO: Kecemasan Digital di Kalangan Pengguna TikTok	EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Sosial	Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023

18	Teachers Perception of the Use of Social Media in the Learning Process	Celebes Journal of Elementary Education	Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023
19	Nongkrong as a Form of Stress Coping among Teenagers in Makassar City	Pinisi Journal of Social Science	Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023
20	Peran Kesetaraan Gender Dalam Mempengaruhi Kemandirian Dan Kekuatan Perempuan Bugis Masa Kini	Jurnal Program Studi Pendidikan IPS Program Pascasarjana: Phinisi Integration Review	Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024
21	Fenomena Bullying Dalam Lingkup Pendidikan Berdasarkan Analisis Sosiologi Hukum	Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya	Volume 19 Nomor 1 Tahun 2024
22	Mobile Legends Sebagai Katalisator Komunitas dan Solidaritas (Studi Kasus Pada Pemuda di Desa Bonde Kecamatan Campalagian)	Jurnal Program Studi Pendidikan IPS Program Pascasarjana: Phinisi Integration Review	Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024
23	The Role of Cultural Factors in Consumer Behavior on Purchasing Decisions for Herbal Products	Pinisi Business Administration Review	Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024

24	Assessing Public Awareness and Stakeholder Influence in Renewable Energy Implementation: A Case Study from Sulawesi, Indonesia	Journal Of Asian Energy	Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024
25	The Role of Character Education in Reducing Bullying Behaviour in Elementary Schools	Celebes Journal of Elementary Education	Volume 2 Nomor 2 Tahun 2024
26	Kearifan Lokal dan Pembentukan Karakter Siswa Dalam Program P5 di Polewali Mandar	Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar	Volume 9 Nomor 4 Tahun 2024

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	The 8 <sup>th</sup> International Symposiim of Journal Antropologi Infonesia	Are you Interested?": Sexting Through Instagram in Time of Covid-19 Pandemic	Manado, 2 – 5 Agustus 2022
2.	The 2 <sup>nd</sup> International Conferences on Social and Islamic Studies (ICSIS 2022)	Sibali Parriq: Representation Of Local Cultural Values In Gender Equality In Mandar Society	Makassar, 29-30 November 2022
3.	Strengthening National Identity Through Sheikh Yusuf's Historical Traces	The 3rd International Conference on Humanities Education, Law and Social Sciences	Makassar, 22 – 23 Juni 2023

4.	Sexting: Sexual Harassment on Instagram During Covid-19 Pandemic	The 3rd International Conference on Humanities Education, Law and Social Sciences	Makassar, 22 – 23 Juni 2023
5.	Intercultural Interaction in the Multiethnic Context of Makassar City: A Case Study in an Urban Neighborhood	The 3rd International Conference on Humanities Education, Law and Social Sciences	Makassar, 22 – 23 Juni 2023
6.	Digital-based Learning in Social Science Cluster Subjects in High School with Curriculum Merdeka	The 3rd International Conference on Humanities Education, Law and Social Sciences	Makassar, 22 – 23 Juni 2023
6	Cyber Affair: A Phenomenological Study of the Experience of Affair in the Online Gaming	8th International Joint Conference on Science and Technology (IJCST)	Surabaya, 25 September 2024
7	The Role of Family Socialization Function on The Prevention of Violence in Interpersonal Relationship (Dating) in High School Student in South Sulawesi	Semnas Universitas Negeri Makassar	Makassar, 03 November 2024

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Budaya Juang Rakyat Baru Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia	2023	99	CV Global Aksara Pers

Semua data yang diisikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Makassar, 7 September 2025



**Dr. Dyan Paramitha Darmayanti, S. Pd., M. Pd**  
NIP. 199505162022032016

#### 4. Anggota Peneliti 3

##### CURRICULUM VITAE



Nama	Dr. Novayanti Sophia Rukmana S.S.Sos.,M.Si
Profesi/Keahlian	Governance dan Inovasi Publik
Tanggal Lahir	04 Februari 1992
NIP	199202042019032022
NIDN	0904029201
Alamat Rumah	BTN Hamzy Blok R1 no 14
Alamat email	<a href="mailto:novasopiaa@gmail.com">novasopiaa@gmail.com</a>
Indonesia HP	085299971545
Instansi	Jurusan Ilmu Adm, Prodi Adm Negara Fakultas Ilmu Sosial UNM
Lama bekerja	6 Tahun
Kabangsaan	Indonesia
Id Scopus	57224618316
orcid	<a href="https://orcid.org/0000-0002-6802-8099">https://orcid.org/0000-0002-6802-8099</a>
Ig Google scholar	<a href="https://scholar.google.com/citations?user=NimljgwAAAAJ&amp;hl=en">https://scholar.google.com/citations?user=NimljgwAAAAJ&amp;hl=en</a>
Sinta	6761267

##### Pendidikan

Tahun Lulus	Jenjang	Nama Institusi	Bidang Studi
2013	S-1	Universitas Hasanuddin	Ilmu Administrasi

2015	S-2	Universitas Hasanuddin	Ilmu Administrasi Publik
2020	S-3	Universitas Hasanuddin	Ilmu Administrasi Publik

### Mata Kuliah Yang Diampuh

No	Mata kuliah
1	Management Sumberdaya Manusia Sektor Publik
2	Sistem Administrasi Negara Indonesia
3	Management Strategi Sektor Publik
4	Birokrasi
5	Administrasi Perpajakan dan Retribusi Daerah
6	Administrasi Pembangunan
7	Administrasi Pemerintahan Daerah
8	Patologi Administrasi
9	Kebijakan Publik

### Keanggotaan dalam Komunitas Profesional

2019-Sekarang	Anggota Indonesian Association for Public Administration (IAPA)
2021-2025	Pengurus IKA Administrasi Unhas

### Pengalaman Pelatihan

Tahun Pelaksanaan	Nama pelatihan	Penyelenggara
2017	Rembuk Nasional 3 Tahun Bersama Jokowi-JK	UNHAS
2018	Bimbingan Teknis Proposal Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	LLDIKTI Wilayah IX
2018	Penataran Penelitian Pemula	Stisip Muh. Sinjai
2018	Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi Mendeley dan NVIVO	

2018	Pelatihan Pedagogik Dosen Muda FIS UNM	FIS UNM
2019	Penataran/Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)	LP2MP UNM
2019	Workshop On Akademik Writing By Using Mendeley: Citation And Plagiarism Checker	Forum Pascasarjana Adm Publik Unhas
2019	Workshop Penulisan Jurnal	Forum Pascasarjana Adm Publik Unhas
2019	KULIAH UMUM Bersama Prof.Evan Berman,B.Sc.,M.A.,Ph.D. Dari Victoria University Of Wellington New Zealand	Forum Pascasarjana Adm Publik Unhas
2020	Pelatihan Applied Approach	LP2MP UNM
2021	Pelatihan Smart Teaching	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
2023	Certification in Audit Commite Practices (CACP) 2023	Ikatan Komite Audit Indonesia

### **Pengalaman Pemateri**

Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
2018	Pelatihan advokasi kebijakan bagi kelompok perempuan desa di kabupaten maros	Narasumber
2018	Latihan kader 1 HPMM	Narasumber
2018	Narasumber pada dialog keperempuanan HPMM Cabang Curio	Narasumber
2018	Pelatihan Pembuatan SOP pada Crisis Center di Kabupaten Raja Ampat	Narasumber

2019	Seminar Nasional Public Expo 2019 HIMAGARA FIS UNM	Narasumber
2020	Webinar dengan tema “POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN ENREKANG PASCA COVID-19”	Narasumber
2021	Kegiatan Sigidokkoan	Narasumber
2021	Pemaparan Ramperda PSU kabupaten Mamuju Tengah	Narasumber

### Publikasi Ilmiah

1	<i>Managing Complexity And Resource-Based Strategy Cases In The Implementation Of Food Security Policy In Indonesia</i> Dorma Journals (Journal of Environmental Treatment Techniques ).
2	Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan Di Indonesia Timur: Dampak Terhadap Tata Kelola Perkotaan. Artikel dalam Jurnal Ilmu Administrasi (JIA), <i>JIA Vol. XVI No.2, pp (258-272) © 2019. ISSN 1829 – 8974 e-ISSN 2614-2597</i>
3	Institutional Capacity in Clean Water Management in Jeneponto Regency. Artikel terbit pada Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik. Volume 9 Number 2, July– December 2019. Page 167-176
4	Responsivitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Sinjai. Artikel terbit pada Jurnal "Administrasi Publik" Volume XVI Nomor 1 Juni 2020
5	Food Security Policy Implementation Network in Bone. Artikel terbit pada International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. ISSN 2364-5369 Volume 7, Issue 1 FEBRUARY, 2020 pAGES: 734-741
6	Going Local For Food Security: Strengthening Local Collaborative Institution In Implementation Of Food Security In Indonesia. Artikel ini terbit pada International Journal of Management (IJM). Volume 11, Issue 08, August 2020, pp. 1998-2009. Article ID: IJM_11_08_176

7	Complexity and Public Policy: Network Model of Food Security Policy Implementation in Bone Regency. Artikel ini terbit pada Proceedings IAPA Annual Conference 2019. ISBN: 978-623-92005-1-0
8	Community Based-Organization: Can It Empower People? Implementation Network of the Food Diversification Policy In Indonesia. Artikel ini terbit pada Proceeding Book MPSHR–Oct 26-27, 2019. ISBN: 978-969-683-698-8
9	Kinerja Dewan Pengawas Dalam Tata Kelola Badan Layanan Umum Univesitas Negeri Makassar. Artikle ini terbit pada Proceedings of National Seminar. Research and Community Service Intitute Universitas Negeri Makassar, 2021
10	Evaluasi Kebijakan Larangan Parkir Di Bahu Jalan Di Kota Makassar (Studi Kasus : Jalan DR. Sam Ratulangi, Kecamatan Mariso), <i>Jurnal Aktor</i> Vol. 1, No. 2, Februari 2022 p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167.
11	Collaborative innovation and social exchange: Implementing policy innovation in Indonesia. <i>International Journal of Health Sciences</i> , 6(S2), 443–454. <a href="https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS2.5027">https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS2.5027</a>
12	Managing Trust in The Implementation Network of Food Diversification Policy in South Sulawesi Province. <i>Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik</i> Volume 12 Number 1, January–June 2022. Page 116-122 p-ISSN: 2086-6364, e-ISSN: 2549-7499, Homepage: <a href="http://ojs.unm.ac.id/iap">http://ojs.unm.ac.id/iap</a>
13	Strategy in public service, <i>Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik</i> , Volume 12 Number 2, July–December 2022. Page 439-449, p-ISSN: 2086-6364, e-ISSN: 2549-7499, Homepage: <a href="http://ojs.unm.ac.id/iap">http://ojs.unm.ac.id/iap</a>
14	Public Service Innovation Management (Study on Saskia Innovation in Bantaeng Regency). <i>ICSAT INTERNATIONAL PROCEEDING</i> , ISBN: 978-623-7496-62-5 Vol, 11 Issue 1
15	Supporting Factors Faced By Students In Learning English In The New Normal Era, Seminar Nasional Hasil Penelitian 202 “ <i>Membangun Negeri Dengan Inovasi Tiada Henti Melalui Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat</i> ” Lp2m-Universitas Negeri Makassar

16	<i>The Challenges Faced By Students In Learning English (Post-Pandemic Era)</i> . Interference, Journal Of Language, Literature, And Linguistics, E-Issn: 2721-1835 P-Issn: 2721-1827
17	PKM Penerapan Buku Curhat Berbasis <i>Self-Counseling</i> dalam Mereduksi Perilaku Agresi Anak Jalanan, IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Vol. 2., No. 3, 2023
18	Lecturer Motivation and Certification on Lecturer Performance through Job Satisfaction, <i>Proceedings of the First Australian International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Sydney, Australia, December 20-22, 2022</i>
19	Penyuluhan Social Preneur Bagi Kelompok PKK Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Panrita Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat E-ISSN: 2964-9064 Vol. 2, No. 1 2023 Page 12-18
20	The Role of Actors in Managing Collaborative Tourism in Indonesia, IAPA 2022 International Conference and International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS) Volume 2023
21	Tantangan dan Peluang dalam Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa. Ruang Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1, Nomor 1, April 2023 (42-48) e-ISSN xxxx-xxxx, DOI - <a href="https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ruangkomunitas">https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ruangkomunitas</a> .

### Pemakalah

Waktu pelaksanaan	Makalah	Penyelenggara
2018	Narasumber pada Pelatihan advokasi kebijakan bagi kelompok perempuan desa di kabupaten maros	LP2M Unhas
2018	Pemateri pada Latihan kader 1 HPMM	Himpunan Pelajar Mahasiswa Masserempulu

2018	Narasumber pada dialog keberempuanan HPMM Cabang Curio	Himpunan Pelajar Mahasiswa Masserempulu
2018	Narsumber pada Pelatihan Pembuatan SOP pada Crisis Center di Kabupaten Raja Ampat	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
2019	Complexity and Public Policy: Network Model of Food Security Policy Implementation in Bone Regency	Indonesian Association For Public Administration
2019	Community Based-Organization: Can It Empower People? Implementation Network of the Food Diversification Policy In Indonesia	European Social Science Foundation
2019	Seminar Nasional Public Expo 2019 HIMAGARA FIS UNM	Narasumber
2020	Webinar dengan tema "Potensi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Enrekang Pasca Covid-19"	Narasumber
2020	Public Service Innovation in the Investment Office and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) of Makassar City	International Joint Conference on Science and Technology
2021	Entrepreneur Spirit for Innovative Bureaucracy: Experience of Bureaucratic Innovation in Indonesia.	Hicospos 2021
2021	Pemakalah : Kinerja Dewan Pengawas Dalam Tata Kelola	Seminar Nasional Hasil Hasil Penelitian dan

	Badan Layanan Umum Univesitas Negeri Makassar	pengabdian Kepada Masyarakat.
--	--	----------------------------------

### G. Pengalaman Penelitian

No	Judul Penelitian	Jabatan	Tahun
1	Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah Di Puskesmas Sumbang	Ketua	2012
2	Public Privat Partnership dalam Pengelolaan Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus Kerja sama RSUP Wahidin Sudirahusodo dengan PT ISS)	Ketua	2015
3	Model Kebijakan Pemberdayaan masyarakat terintegrasi Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota	2016
4	Kajian Desain Rencana Strategik Pembangunan Desa Kabupaten Raja Ampat	Anggota	2016
5	Kajian Desain Rencana Strategis Pembangunan Kampung	Anggota	2017
6	Responsivitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan SIUP di DPMPTSP Kab. Bone	Ketua	2018
7	Pemetaan Patologi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Makassar	Anggota	2018
8	Inovasi Pelayanan Publik pada DPMPTS Kota Makassar	Anggota	2019
9	Analisis Governance Network dalam jaringan implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone	Ketua	2019
10	Kajian Penyusunan Road Map Inovasi Daerah Kabupaten Enrekang	Anggota	2019

11	Road Map Pengembangan Kapasitas ASN Sektor Komoditas Unggulan Kabupaten Mamuju Tengah	Anggota	2020
12	Kajian Penempatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Jabatan Struktural/Fungsional Kabupaten Mamuju Tengah	Anggota	2020
13	Kajian Road Map Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Terpadu Kabupaten Mamuju Tengah	Anggota	2020
14	Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah	Anggota	2020
15	Kajian Penyusunan Ramperda PSU Kabupaten Mamuju Tengah	Anggota	2021
16	Kajian penyusunan Model Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis <i>Partisipatory Governance</i> Di Kabupaten Mamuju Tengah.	Anggota	2021
17	Analisis Perbandingan dan Peran Dewas dalam Pengawasan Tata Kelola Badan Layanan Umum Universitas Negeri Makassar	Anggota	2021
18	Strategi Kebijakan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Makassar)	Anggota	2021
19	Managing Collaborative Matching Fund Kemendikbud: Studi pada Program Kedaireka Universitas Negeri Makassar.	Anggota	2022
20	Penguatan Community Based	Ketua	2023

	Organization Untuk Mencapai Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		
21	Difusion Innovation Digitalisasi Perpustakaan di Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua	2023
22	Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat Pesisir (Studi Pass Nelayan Pulau Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar)	Anggota	2023

#### H. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat

No	Judul Pengabdian	Jabatan	Tahun
1	Pelatihan dan Pengelolaan Bumdes di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Kerjasama LP2M Unhas Dengan Pemda Kab. Takalar	Anggota	2018
2	Dewan Juri Pada Debat Expo Hmagara FIS UNM	Dewan Juri	2018
3	Pkm Penguatan Ekonomi Desa Melalui Bumdes Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Kerjasama LP2M UNM Dengan Pemda Kab. Jeneponto	Anggota	2020
4	Model e- Bumdes Sebagai upaya pengembangan Desa di Kecamatan Tanete Riatta Kabupaten Bone	Anggota	2021
5	Optimalisasi Layanan dan Informasi Desa Melalui Digitalisasi Kelembagaan di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo	Anggota	2021

	Penguatan Kelembagaan Bumdes sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif di Pulau Lakkang	Ketua	2023
	Peningkatan Peran Pokdarwis dalam Manajemen Pariwisata Berbasis Teknologi Informasi	Ketua	2023

Semua pernyataan yang ada dalam curriculum vitae di atas adalah benar

Makassar, 6 September 2025

  
 Dr. Novayanti Sophia Rukmana S. S.Sos., M.Si., CACP  
 NIP. 199202042019032022

#### 4. Anggota Peneliti 4

##### CURRICULUM VITAE



##### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	<b>Oky Nur Pratiwi Johansyah, S.IP, M.Si</b>
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/No. Identitas Lainnya	198910242022032006
5	NIDN	0024108910
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Makassar, 24 Oktober 1989
7	Alamat e-mail	oky.nur.pratiwi@unm.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	08114133373
9	Alamat Kantor	Jl. Raya Pendidikan, Kampus FIS UNM, Gunungsari Baru, 90222
10	Nomor Telepon/Fax.	0411-889464 / 0411-887406

## B. Riwayat Pendidikan

Nama PT.	S1	S2	S3
	UNHAS	UNHAS	-
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Administrasi Pembangunan	-
Tahun Masuk- Lulus	2007-2011	2013-2016	-

	S1	S2	S3
Judul Skripsi/ Tesis/Disertai	Elektronik Government dan Pelayanan Publik di Kota Makassar	Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Ombudsman Kota Makassar)	
Nama Pembimbing/ Promotor	1. Prof. Dr. H. Faried Ali, SH, MS 2. Dr. Indar Arifin, M.Si	1. Prof. Dr. Sangkala, MA 2. Dr. Hamsinah, M.Si	

### C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2010	Elektronik Government dan Pelayanan Publik di Kota Makassar	Mandiri	-
2	2015	Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Ombudsman Kota Makassar)	BPPDN Dikti	18.000.000
3	2023	Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat Pesisir ( Studi pada Nelayan Pulau Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makasar)	PNBP	15.000.000
4	2023	Penguatan <i>Community Based Organization</i> untuk mencapai ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	PNBP	15.000.000

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2022	Digitalisasi Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Gowa	Mandiri	-
2	2023	Pemberdayaan Perangkat Kelurahan Lakkang Kecamatan	PNBP	10.000.000

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
		Tallo Kota Makassar dalam Penggunaan Sistem Informasi Kelurahan		
3	2023	Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Berbasis elektronik pada perangkat kelurahan Lakkang Kota Makassar	Mandiri	-
4	2023	Penguatan Kelembagaan BuMDes: Upaya Meningkatkan Potensi Ekonomi Kreatif di Pulau Lakkang	Mandiri	-
5	2023	Inovasi Manajemen Referensi : pelatihan Aplikasi <i>Research Rabbit dan Zotero</i> untuk mahasiswa ekonomi	Mandiri	-
6	2023	Mengoptimalkan Peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian Desa di Kecamatan Bangkala Kab. Jeneponto	Mandiri	-
7	2023	Pelatihan Penggunaan Media Pembelajaran Digital	Mandiri	-

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
		menggunakan <i>Quizziz</i> dan <i>Canva</i> bagi Dosen FISH untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa		

#### E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
1	2023	<i>Public Service Innovations through the establishment of the Makassar City Ombudsman (OKM) Institution</i>	Volume 13 No. 1 Januari-Juni 2023, hal 269-280	Jurnal Ilmu Adminisrasi Publik : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Admministrasi Publik
2	2023	Responsivitas Pemerintah Melalui Elektronik Governement di Kota Makassar	Volume 24, No. 1 edisi April 2023 hal 61-81	Jurnal Lembaga Administrasi Negara
3	2023	<i>Access to Health in Border Areas : Literature Review</i>	Volume 13 No 1 , edisi Januari-juni 2023 Hal. 243-252	Jurnal Ilmu Adminisrasi Publik : Jurnal Pemikiran dan Penelitian

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
				Administrasi Publik
4	2023	<i>Adaptive Governance Planning Strategis in Green Open Spaces In Makassar</i>	Volume 5 No. 1 Agustus 2023	Jurnal Predestination
5	2023	<i>Evaluation of The Program to Improve the Walfare of Poor Families in Sallasa Village, Curio District, Enrekang District</i>	Volume 3 No 1, Oktober 2023, Hal 56-61	Jurnal Aktor
6	2023	Menjembatani eksplorasi dan Eksplorasi : Ambidextrus Leadership dalam Transformasi Pelayanan Publik Indonesia	Volume 5 No. 2 Oktober 2023 , Hal 147-154	Jurnal Pallangga Praja
7	2024	Dasawisma Community Empowerment Program in Tappale Village, Libureng District, Bone Regency.	Volume 3 No. 3 Juni 2024, Hal 17-31	Jurnal Aktor
8	2024	Information Technology in Improving the Wuality of Public Services: E0Government System Analysis	Volume 7, Issue 2 Maret Hal 411-424	Pinis Discretion Review

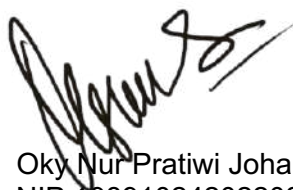
No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
9	2024	<i>Empowerment of coastal communities of lakkang Island, tallo district, makassar city</i>	Volume 3. No. 2 Februari Hal 26-40	Jurnal Aktor
10	2024	Loyalitas dan Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil: Kajian Fenomenologis Melalui Model Sinergis Pengembangan Karir	Volume 3 No.1 Maret Hal. 97-103	JAKD ( Jurnal Administrasi Karya Dharma)
11	2024	Supervision Function of the Environmental Service in Overcoming Environmental Pollution in the City of Makassar	Volume 3 No 2 Februari 2024	Jurnal Aktor
12	2024	Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Volume 30, No. 2 Agustus Hal 157-175	Jurnal Administrasi Negara
13	2024	Management of Drought Emergency Response Through the “Air Disuntik Resahpun Terobati” Program at The Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo.	Volume 8 Issue 1 September Hal 149-158	Pinisi Disrection Review
	2024	Evaluation Of Inpatient Services at H. Andi Sulthan Daeng Radja Regional, General Hospital Bulukumba Regency.	Volume 4 No. 1 Oktober Hal. 56-65	Jurnal Aktor

**F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	<i>The 2<sup>nd</sup> international conference on lifescience an biology education</i>	<i>E-Module application development based on result project-based</i>	2010, Jakarta
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Makassar, 6 September 2025



Oky Nur Pratiwi Johansyah, S.Ip, M.Si  
NIP.198910242022032006

## DOKUMENTASI



**Gambar 1.** Dokumentasi Pribadi. Tim Peneliti melakukan rapat awal dengan tim membahas rencana penelitian, dan dokumen penelitian



**Gambar 2.** Dokumentasi Pribadi. Tim Peneliti melakukan rapat awal dengan tim membahas rencana penelitian, dan dokumen penelitian



**Gambar 3.** Dokumentasi Pribadi. Tim Peneliti melakukan rapat membahas instrument penelitian dan membangun komunikais awal dengan informan kunci



**Gambar 4.** Dokumentasi Pribadi. Tim Peneliti melakukan rapat membahas instrument penelitian dan membangun komunikais awal dengan informan kunci



**Gambar 5.** Dokumentasi Pribadi. Tim Peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci



**Gambar 6.** Dokumentasi Pribadi. Tim Peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci



**Gambar 7.** Dokumentasi Pribadi. Tim Peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci



**Gambar 8.** Dokumentasi Pribadi. Tim Peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian



**Gambar 8.** Dokumentasi Pribadi. Tim Peneliti melakukan seminar akhir Penelitian



**Gambar 9.** Dokumentasi Pribadi. Tim Peneliti melakukan seminar akhir Penelitian

RAB PENELITIAN KOLABORASI PEMKOT, UNHAS DAN UNM TAHUN 2025

No	Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Volume	Biaya Satuan	Total
1	Bahan dan Perlengkapan	ATK	Pensil, pulpen, kertas, buku catatan, map, stapler, highlighter, gunting, amplop, lem, isolasi, double tape, dan lain-lain	Paket	2	1000000	2000000
2		Habis Pakai	Tinta Epson 008 Black Colour	Unit	2	945000	1890000
3		Persediaan	Hard Disk Notebook 1 TB WDC My Passport USB 3.0 (EXT) New Type (BN309)	Unit	5	1125000	5625000
4		Persediaan	Bahan Referensi	Buku	25	250000	6250000
5				Jurnal Online	2	2500000	5000000
6				Aplikasi (Zoom, Adobe, Canva, Gamma, Chat GPT, Hukum Online, dll)	3	1500000	4500000
7	Pengumpulan data	Enumerator	30.000 org/jam. 9 Jam per minggu x 4 Bulan	Orang Per -jam (OJ)	3	4320000	12960000
8		Transport	Pembantu Peneliti 2 orang x 12 kali turun lapangan (transport lokal makassar)	Orang Per Kegiatan (OK)	24	150000	3600000
9		Transport	Petugas Survei 3 orang x 8 kali turun lapangan (transport lokal makassar)	Orang Per Kegiatan (OK)	24	150000	3600000
10	Analisis Data	Analisis	2.287.500 per orang (Analisis Data Kuantitatif Lab FKM Universitas Hasanuddin)	Orang Per Kegiatan (OK)	2	2287500	4575000
11		Coworking Space	Rapat Tim Peneliti 5 Kali x 5 Orang per 3 jam	Orang Per Kegiatan (OK)	25	500000	12500000
12		Biaya konsumsi	Rapat Tim Peneliti 7 Kali x 5 Orang	Orang Per Kegiatan (OK)	35	100000	3500000
13	Pelaporan Hasil Penelitian	Rapat Perampungan Laporan Kegiatan dan Pembuatan Policy Brief	Rapat Tim Peneliti 2 Kali x 5 Orang per 6 jam	Orang Per Kegiatan (OK)	10	250000	2500000
14		Konsumsi Rapat Perampungan	Rapat Tim Peneliti 2 Kali x 5 Orang per 6 jam		2	750000	1500000
15	Policy Brief	Tim Peeliti	1 Kali	Policy Brief	1	9000000	9000000
16	Luaran Jurnal Internasional	Scopus Q1/Q2	1 Kali	Artikel	1	43000000	43000000
17	Luaran Jurnal Internasional	Ebsco/Wos	1 Kali	Artikel	1	3000000	3000000
<b>TOTAL</b>							<b>125000000</b>



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**(BALITBANGDA)**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KOTA MAKASSAR**

NOMOR : 070.02/047/KEP/IV/2025

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENELITI PADA SUB KEGIATAN PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menunjuk Tim Peneliti pada Kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penunjukan Tim Peneliti pada Sub Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang tentang Kota Makassar di Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENELITI PADA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menunjuk Tim Peneliti pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang tenaga ahli pejabat eselon I/Min.S3/yang disetarakan;
  - b. 4 (empat) orang tenaga ahli pejabat eselon II/Min.S2/yang disetarakan;
- KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal memberikan saran dan pertimbangan serta analisa dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Kepada Tim Peneliti sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberi honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan rincian :
- a. tenaga ahli pejabat eselon I/Min.S3/yang disetarakan sebesar Rp1.200.000,00/orang/jam/Kegiatan.
  - b. tenaga ahli pejabat eselon II/Min.S2/yang disetarakan sebesar Rp1.000.000,00/orang/jam/Kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan keputusan ini, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 April 2025

KEPALA BADAN



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP.  
NIP. 497304252005021001

Tembusan

1. Wali Kota di Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar;

Lampiran : Keputusan Kepala BPPD Kota Makassar  
Nomor : 070.02/047/KEP/IV/2025

DAFTAR PELAKSANA TIM PENELITI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Armin Darmawan	Ketua Tim Peneliti
2.	Sulmiah, S.Pd., M.A.P	Anggota Peneliti
3	Dr. Dyan Paramitha Darmayanti, S.Pd., M.Pd	Anggota Peneliti
4	Dr. Novayanti Sopia Rukmana, S.Sos., M.Si	Anggota Peneliti
5	Oky Nur Pratiwi Johansyah, S.Pi., M.Si	Anggota Peneliti
6	Dody Agriyanto, S.Sos.,M.Si	Anggota Peneliti
7	Rachmatan, ST.,MM	Anggota Peneliti

Makassar, 30 April 2025

KEPALA BADAN



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.A.P.

NIP. 497304252005021001



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
(BALITBANGDA)**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111

Makassar, 27 Mei 2025

Nomor : 000.9.2/675/BPPD/V/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumpulan Data Penelitian

Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
(BAPPEDA) Kota Makassar

Di -  
Makassar

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan penelitian, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemahaman terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan pada pengembangan sebuah ide, teori atau gagasan tetapi lebih berfokus memberikan solusi atas permasalahan tertentu yang ada di Kota Makassar.

Balitbangda Kota Makassar sedang melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul "**Analisis Kelayakan Kebijakan Program Seragam Gratis bagi Siswa SD dan SMP di Kota Makassar**". Sehubungan dengan hal tersebut, kami menugaskan Tim Peneliti :

1. Ir. Armin Darmawan (Ketua Tim)
2. Sulmiah, S.Pd., M.AP (Anggota)
3. Dr. Dyan Paramitha Darmayanti, S.Pd., M.Pd (Anggota)
4. Dr. Novayanti Sopia Rukmana, S.Sos., M.Si (Anggota)
5. Oky Nur Pratiwi Johansyah, S.IP., M.Si (Anggota)

untuk melakukan pengumpulan data penelitian terkait dengan judul tersebut. Maka dengan ini kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan terkait dengan penelitian tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person kami melalui 082349965245 (Ismaniar Ismail).

Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP.  
NIP. 497304252005021001

**Tembusan :**

1. Bapak Wali Kota Makassar di Makassar (Sebagai Laporan) ;
2. Peninggal



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**(BALITBANGDA)**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111

Makassar, 27 Mei 2025

Nomor : 000.9.2/676/BPPD/V/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumpulan Data Penelitian

Yth. Dewan Pendidikan Kota Makassar

Di -  
Makassar

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan penelitian, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemahaman terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan pada pengembangan sebuah ide, teori atau gagasan tetapi lebih berfokus memberikan solusi atas permasalahan tertentu yang ada di Kota Makassar.

Balitbangda Kota Makassar sedang melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul "**Analisis Kelayakan Kebijakan Program Seragam Gratis bagi Siswa SD dan SMP di Kota Makassar**". Sehubungan dengan hal tersebut, kami menugaskan Tim Peneliti :

1. Ir. Armin Darmawan (Ketua Tim)
2. Sulmiah, S.Pd., M.AP (Anggota)
3. Dr. Dyan Paramitha Darmayanti, S.Pd., M.Pd (Anggota)
4. Dr. Novayanti Sophia Rukmana, S.Sos., M.Si (Anggota)
5. Oky Nur Pratiwi Johansyah, S.IP., M.Si (Anggota)

untuk melakukan pengumpulan data penelitian terkait dengan judul tersebut. Maka dengan ini kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan terkait dengan penelitian tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person kami melalui 082349965245 (Ismaniar Ismail).

Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN



**NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP.**  
NIP. 497304252005021001

**Tembusan :**

1. Bapak Wali Kota Makassar di Makassar (Sebagai Laporan) ;
2. Paringgal



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**(BALITBANGDA)**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111

Makassar, 27 Mei 2025

Nomor : 000.9.2/673/BPPD/V/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumpulan Data Penelitian

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar

Di -  
Makassar

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan penelitian, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemahaman terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan pada pengembangan sebuah ide, teori atau gagasan tetapi lebih berfokus memberikan solusi atas permasalahan tertentu yang ada di Kota Makassar.

Balitbangda Kota Makassar sedang melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul “**Analisis Kelayakan Kebijakan Program Seragam Gratis bagi Siswa SD dan SMP di Kota Makassar**”. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menugaskan Tim Peneliti :

1. Ir. Armin Darmawan (Ketua Tim)
2. Sulmiah, S.Pd., M.AP (Anggota)
3. Dr. Dyan Paramitha Darmayanti, S.Pd., M.Pd (Anggota)
4. Dr. Novayanti Sopia Rukmana, S.Sos., M.Si (Anggota)
5. Oky Nur Pratiwi Johansyah, S.IP., M.Si (Anggota)

untuk melakukan pengumpulan data penelitian terkait dengan judul tersebut. Maka dengan ini kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan terkait dengan penelitian tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person kami melalui 082349965245 (Ismaniar Ismail).

Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN



**NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP.**

NIP. 497304252005021001

**Tembusan :**

1. Bapak Wali Kota Makassar di Makassar (Sebagai Laporan) ;
2. Pertiinggal



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**(BALITBANGDA)**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111

Makassar, 27 Mei 2025

Nomor : 000.9.2/674/BPPD/V/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumpulan Data Penelitian

Yth. Kepala Sosial Kota Makassar

Di -  
Makassar

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan penelitian, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemahaman terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan pada pengembangan sebuah ide, teori atau gagasan tetapi lebih berfokus memberikan solusi atas permasalahan tertentu yang ada di Kota Makassar.

Balitbangda Kota Makassar sedang melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul "**Analisis Kelayakan Kebijakan Program Seragam Gratis bagi Siswa SD dan SMP di Kota Makassar**". Sehubungan dengan hal tersebut, kami menugaskan Tim Peneliti :

1. Ir. Armin Darmawan (Ketua Tim)
2. Sulmiah, S.Pd., M.AP (Anggota)
3. Dr. Dyan Paramitha Darmayanti, S.Pd., M.Pd (Anggota)
4. Dr. Novayanti Sopia Rukmana, S.Sos., M.Si (Anggota)
5. Oky Nur Pratiwi Johansyah, S.IP., M.Si (Anggota)

untuk melakukan pengumpulan data penelitian terkait dengan judul tersebut. Maka dengan ini kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan terkait dengan penelitian tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person kami melalui 082349965245 (Ismaniar Ismail).

Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN



**NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP.**

NIP. 497304252005021001

**Tembusan :**

1. Bapak Wali Kota Makassar di Makassar (Sebagai Laporan) ;
2. Peninggal